



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

JL. LINGKAR BARAT III RT.15
KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM
BARAJO KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183

FAX : (0741) 3081183

Email : bptd5jambi@gmail.com

Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

Nomor : um.006 / 1 / 12 / BPTD KLS-II - JMB / 2024
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) laporan
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Jambi
Tahun 2023

Jambi, 25 Januari 2024

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: PR.202/3/13/DJPD/2023 tanggal 13 Desember 2023 hal Penyusunan dan Pengumpulan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari Visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu : Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong";
2. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :
 - 1) Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi;
 - 2) Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
 - 3) Meningkatnya keselamatan transportasi darat;
 - 4) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
 - 5) Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel.

Dari tujuan di atas, kemudian dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada Tahun 2023, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya;

3. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah Baik, dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2023, terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan sama dengan 100% ($IKP=100\%$) dan tidak ada Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq IKP \leq 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
- 2) Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 100%;
- 3) Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 100%;
- 4) Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 95% (target 95%) tercapai 100%;
- 5) Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
- 6) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 80% (target 80%) tercapai 100%;
- 7) Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1% (target 1%) tercapai 100%;
- 8) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1.500 orang (target 1.500 orang) tercapai 100%;
- 9) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 80% (target 80%) tercapai 100%;
- 10) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayanan SDP terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 lokasi) tercapai 100%;
- 11) Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 87 (target senilai 87) tercapai 100%;
- 12) Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 88 (target senilai 88) tercapai 100%.

4. Bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesain sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak Seditjen diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat.



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI



bptdjambi



BPTD Kelas II Jambi



hubdat.dephub.go.id/bptd/jambi



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2023

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2023

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Pande Gede Semarapura	Penyusun Rencana dan Pelaporan	25/01/2024	
		Keke Inggriani	Analisis Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	25/1/24	
		Muhamad Kholik	Petugas Kalibrasi Penguji Kendaraan Bermotor	25/1/24	
		Dina Safitri	Pengadministrasi Perkantoran	25/1/24	
2.	Diperiksa	Herry Wanda	Kepala Subbagian Tata Usaha	25/1/24	
	Disetujui	Herry Wanda	Kepala Subbagian Tata Usaha	25/1/24	



KATA PENGANTAR

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mencakup Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2023, serta tingkat efisisensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2023.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Dibuat di Jambi
Pada tanggal 25 Januari 2024

Kepala Balai,



Eko Indra Yanto
NIP. 19790220 200112 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma'aruf Amin melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024 mengusung Visi "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024. Pencapaian Visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari Visi Kementerian Perhubungan 2020-2024 dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024, yaitu : Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Rencana Strategis (Renstra) memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni :

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
5. Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel.

Dari tujuan diatas, dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Program. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada Tahun 2023, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sudah baik.

Dari 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi tahun 2023, terdapat 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan sama dengan 100% (IKP=100%) dan tidak ada Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% ($0\% \leq \text{IKP} \leq 100\%$). Adapun rincian capaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
2. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 100%;
3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi) tercapai 100%;
4. Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi sebesar 95% (target 95%) tercapai 100%;
5. Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi sebesar 100% (target 100%) tercapai 100%;
6. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi sebesar 80% (target 80%) tercapai 100%;
7. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi sebesar 1% (target 1%) tercapai 100%;

8. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi sebesar 1.500 orang (target 1.500 orang) tercapai 100%;
9. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi sebesar 80% (target 80%) tercapai 100%;
10. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayanan SDP terealisasi sebesar 1 Lokasi (target 1 lokasi) tercapai 100%;
11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terealisasi senilai 87 (target senilai 87) tercapai 100%;
12. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terealisasi senilai 88 (target senilai 88) tercapai 100%.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan redesign sistem perencanaan dan penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
I.2.1. Bagan Struktur Organisasi.....	5
I.3. Sumber Daya Manusia.....	6
I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.....	6
I.5. Sistematika Laporan.....	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	13
II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.....	15
II.2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
II.2.1. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023	20
II.2.2. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2023	25
II.2.3. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2023	27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	30
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja	30
III.2.1 SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	34
IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	34
a.1. Definisi Indikator Kinerja	34
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	35
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	36
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	38
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	38
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	39
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	39
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A & Terminal Barang yang beroperasi	39
a.1. Definisi Indikator Kinerja	40
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	41
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	41
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	43



a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	43
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	44
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	44
IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	45
a.1. Definisi Indikator Kinerja	45
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	46
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	47
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	48
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	49
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	49
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	50
III.2.2 SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	51
IKK 2.1 Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A	52
a.1. Definisi Indikator Kinerja	52
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	52
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	53
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	54
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	55
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	55
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	56
IKK 2.3 Persentase pelaksanaan SPM di pelabuhan SDP	57
a.1. Definisi Indikator Kinerja	57
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	58
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	58
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	60
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	60
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	60
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	61
III.2.3 SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	62
IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	63
a.1. Definisi Indikator Kinerja	63
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	64
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	64
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	66

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	66
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	66
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	67
 IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal	
Perhubungan Darat	68
a.1. Definisi Indikator Kinerja	68
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	69
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	70
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	71
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	71
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	72
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	73
 IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang	
keselamatan transportasi jalan	74
a.1. Definisi Indikator Kinerja	74
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	74
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	75
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	76
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	77
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	77
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	78
 IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan	
Bermotor	79
a.1. Definisi Indikator Kinerja	79
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	80
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	81
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	82
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	82
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	83
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	83
 IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran	
SDP	84
a.1. Definisi Indikator Kinerja	84
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	85
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	85



a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	86
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	87
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	87
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	88
III.2.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	89
IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi Darat	89
a.1. Definisi Indikator Kinerja	89
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	90
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	90
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	91
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	92
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	92
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	93
III.2.5 SK 1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel	94
IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan Darat	95
a.1. Definisi Indikator Kinerja	95
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023	95
a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan	96
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang	97
a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan 2022	97
a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024	98
a.7. <i>Benchmark</i> Nasional	98
III.2.6 Capaian Lainnya	99
III.3. Realisasi Anggaran	100
III.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2023	100
III.3.1.1 Pagu Anggaran	100
a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023 Per Triwulan IV	100
a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan IV	100
a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran	100
III.3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2023	102
a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023 Per Triwulan IV	102
a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan IV	103
a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan IV	104



a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2023 Per Triwulan IV	105
III.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2023	107
III.3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023	109
III.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 Per Triwulan IV	109
III.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan IV	111
III.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023 Per Triwulan IV	111
III.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja	111
III.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	112
III.3.4 Hambatan dan Kendala	112

BAB IV PENUTUP

IV.1 Ringkasan Capaian	113
IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab	115

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
3. Rencana Aksi Tahun 2023
4. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2023
6. Revisi II Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
7. Revisi II Rencana Aksi Tahun 2023
8. Revisi III Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Sumber Daya Manusia BPTD Kelas II Jambi	6
Tabel II.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.....	14
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023	17
Tabel II.3	Revisi Perjanjian Kinerja I Tahunan Tahun 2023.....	20
Tabel II.4	Revisi Perjanjian Kinerja II Tahunan Tahun 2023	24
Tabel II.5	Revisi Perjanjian Kinerja III Tahunan Tahun 2023	27
Tabel III.1	Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2023	33
Tabel III.2	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	38
Tabel III.3	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	40
Tabel III.4	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	43
Tabel III.5	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	45
Tabel III.6	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	49
Tabel III.7	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	50
Tabel III.8	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	55
Tabel III.9	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	57
Tabel III.10	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	60
Tabel III.11	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	57
Tabel III.12	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	62
Tabel III.13	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	68

Tabel III.14	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	72
Tabel III.15	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	73
Tabel III.16	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	77
Tabel III.17	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	79
Tabel III.18	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	82
Tabel III.19	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	84
Tabel III.20	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	87
Tabel III.21	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	88
Tabel III.22	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	92
Tabel III.23	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	93
Tabel III.24	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023.....	97
Tabel III.25	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022	99
Tabel III.26	Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023 Per Triwulan IV	100
Tabel III.27	Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun 2023 per Triwulan IV	100
Tabel III.28	Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan IV	103
Tabel III.29	Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV	103
Tabel III.30	Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV	104
Tabel III.31	Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2023 per Triwulan IV	105
Tabel III.32	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2023	107



Tabel III.33	Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2023	109
Tabel III.34	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV	111
Tabel III.35	Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan IV	111
Tabel III.36	Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV	111
Tabel III.37	Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan IV	112
Tabel III.38	Capaian Rata-rata Kinerja per Sasaran Program per Triwulan Tahun 2023	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	36
Gambar III.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024	39
Gambar III.3	Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	41
Gambar III.4	Target dan Realisasi Kinerja terhadap Target Kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024 IKK 2	44
Gambar III.5	Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi	46
Gambar III.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024	50
Gambar III.7	Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.....	53
Gambar III.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024	56
Gambar III.9	Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2023	58
Gambar III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024	61
Gambar III.11	Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.....	64
Gambar III.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024	67
Gambar III.13	Grafik Capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.....	69
Gambar III.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.....	72

Gambar III.15	Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023.....	75
Gambar III.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.....	78
Gambar III.17	Grafik Capaian IKK Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023	80
Gambar III.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024	83
Gambar III.19	Grafik Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023.....	85
Gambar III.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.....	88
Gambar III.21	Grafik Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023	90
Gambar III.22	Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.....	93
Gambar III.23	Grafik Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023	95
Gambar III.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024	98



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
3. Rencana Aksi Tahun 2023
4. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2023
6. Revisi II Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
7. Revisi II Rencana Aksi Tahun 2023
8. Revisi III Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka diperlukan akuntabilitas publik sebagai pedoman penyelenggaraannya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap Instansi Pemerintah yang dalam hal ini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah tersebut kepada masyarakat. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sebagai bagian dari instansi pemerintah wajib membuat laporan kinerja Tahun 2023.

I.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Balai Pengelola Transportasi Darat atau disingkat BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat telah terjadi perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi menjadi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

Balai Pengelola Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan, Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Sarana, Prasarana, Lalu lintas dan angkutan, serta Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengelola Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, dan Pelabuhan Sungai, Danau, Penyeberangan;
3. Pelaksanaan pengendalian keselamatan sarana dan angkutan jalan, keselamatan dan keamanan pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, serta melaksanakan kegiatan keperintisan;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
5. Pelaksanaan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan laporan evaluasi kinerja, pengelolaan urusan keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta pelaporan Sistem Akuntansi Instansi,

urusan sumber daya manusia, hukum, hubungan masyarakat, persuratan, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan, rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan.

2. Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan jasa, dan pengoperasian Terminal Tipe A, Terminal barang untuk umum, dan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor, Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, serta bantuan teknis fasilitas pendukung dan integrasi moda dan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian berkala dan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor, pemeriksaan dan sertifikasi kelaiklautan kapal, analisis trayek angkutan jalan antar kota antar provinsi dan angkutan jalan yang disubsidi oleh pemerintah pusat, penetapan jadwal operasi, pemberian subsidi angkutan jalan dan pelayaran perintis sungai, danau, dan penyeberangan, serta bantuan teknis penyediaan sarana jalan, sungai, danau, dan penyeberangan.

4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan

Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan untuk jaringan jalan nasional, penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau, sarana bantu navigasi pelayaran, dan sistem informasi manajemen lalu lintas sungai, danau, dan penyeberangan, pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai dan danau, pemberian rekomendasi laik fungsi jalan nasional non-tol, pemberian bantuan teknis perlengkapan jalan, halte dan rambu sungai danau, pengamatan dan pemantauan perusahaan angkutan jalan, kegiatan karoseri, penyelenggara pengujian berkala kendaraan bermotor, Pelabuhan dan penyelenggara Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, kendaraan bermotor di jalan, tarif angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, pemberian subsidi angkutan jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemenuhan perlengkapan jalan, persetujuan teknis analisis dampak lalu lintas, pemeriksaan

persyaratan teknis kendaraan, pemenuhan kelaiklautan kapal sungai, danau, dan penyeberangan, ketepatan waktu pelayanan, dan pemberian subsidi angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, sarana bantu navigasi pelayaran sungai, danau, kegiatan pengerukan dan reklamasi di kolam Pelabuhan penyeberangan dan alur sungai danau, dan pemanfaatan bantuan teknis, pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran pada Pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta patroli dan pengamanan pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

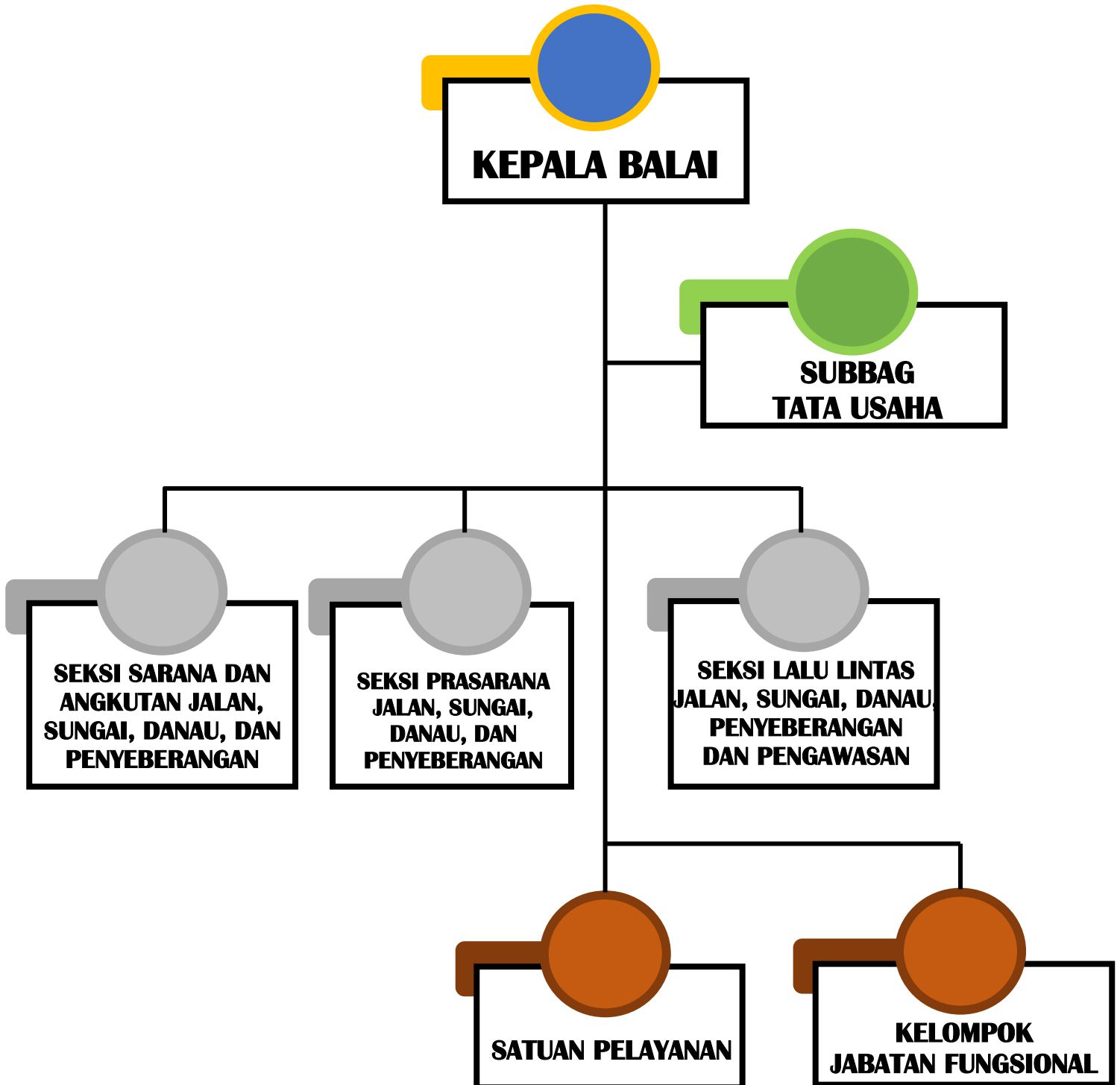
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPTD Kelas II



Bagan Struktur Organisasi BPTD Kelas II

I.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah Pegawai di BPTD Kelas II Jambi adalah sebanyak 333 orang dengan rincian 165 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 166 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

Tabel I. 1 Sumber Daya Manusia BPTD Kelas II Jambi

NO	UNIT KERJA	JUMLAH			TOTAL
		PNS	PPK	PPNPN	
1.	KANTOR INDUK BPTD KELAS II JAMBI	53	1	30	83
2.	TERMINAL TIPE A ALAM BARAJO KOTA JAMBI	13		30	43
3.	SATPEL TERMINAL TIPE A MUARA BUNGO	13	1	19	32
4.	SATPEL TERMINAL TIPE A PULAU TUJUH BANGKO	12		20	32
5.	SATPEL TERMINAL TIPE A SRIBULAN SAROLANGUN	8		16	24
6.	SATPEL UPPKB JAMBI MERLUNG	16		25	41
7.	SATPEL UPPKB PELAWAN SAROLANGUN	16		7	23
8.	SATPEL UPPKB MUARA TEMBESI	27		13	40
9.	SATPEL UPPKB SUNGAI PENUH	-		1	1
10.	SATPEL PELABUHAN PENYEBERANGAN KUALA TUNGKAL	2		5	7
11.	SATPEL PELABUHAN SUNGAI ANGSO DUO	3		-	3
12.	SATPEL PELABUHAN SUNGAI NIPAH PANJANG	1		-	1
13.	SATPEL PELABUHAN SUNGAI MENDAHARA	1		-	1
JUMLAH		165	2	166	

I.4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Untuk mencapai tujuan organisasi maka perlu disusun program kerja, melalui program kerja akan terlihat tahapan-tahapan yang dilakukan serta dukungan materi atau bahan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan program kerja/ kegiatan ini ada beberapa persyaratan/ kriteria yang perlu dipenuhi. Beberapa kriteria tersebut antara lain:

- 1) Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

- 2) Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
- 3) Perencanaan anggaran dan proses pengadaan.

I.5. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- I.3 Sumber Daya Manusia
- I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- I.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
 - II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
- II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - II.2.1. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023
 - II.2.2. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2023
 - II.2.3. Uraian Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- III.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - III.2.1. SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
 - III.2.1.1 IKK 1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
 - a.1. Definisi Indikator Kinerja
 - a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
 - a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2021

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi 2020-2024

a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.1.2 IKK 3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.1.3 IKK 6. Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.2. SK. 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

III.2.2.1 IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024
- a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.2.2 IKK 2.3. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024
- a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.3. SK. 4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat

III.2.3.1 IKK 3.1. Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024
- a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.3.2 IKK 3.2. Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024
- a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.3.3 IKK 3.5. Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024
- a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.3.4 IKK 7a. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024
- a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.3.5 IKK 7b. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.4 SK. 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat

III.2.4.1 IKK 5.1. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024
- a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.5 SK. 1 Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

III.2.5.1 IKK 1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

- a.1. Definisi Indikator Kinerja
- a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
- a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang
- a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022
- a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024
- a.7. *Benchmark* Nasional

III.2.6 Capaian Lainnya

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

III.3.1.1 Pagu Anggaran

a.1.1 Rincian Per Sumber Dana Per Triwulan IV Tahun 2023



a.1.2 Rincian Per Jenis Belanja Per Triwulan IV Tahun 2023

a.1.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

III.3.1.2 *Refocusing* Anggaran Tahun 2023

a.1.1 Rincian Revis Per Sumber Dana Tahun 2023 Per Triwulan IV

a.1.2 Rincian Revis Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan IV

a.1.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per
Triwulan IV

a.1.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2023 Per
Triwulan IV

III.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 - 2023

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

III.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 Per
Triwulan IV

III.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan IV

III.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023 Per Triwulan IV

III.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III.3.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
3. Rencana Aksi Tahun 2023
4. Revisi I Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
5. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2023
6. Revisi II Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023
7. Revisi II Rencana Aksi Tahun 2023
8. Revisi III Perjanjian Kinerja Kepala Balai Tahun 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi saat ini telah mengacu dan menggunakan Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dikarenakan adanya Revisi Rencana Strategis dengan Nomenklatur terbaru di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan perubahan pada target Indikator Kinerja Kegiatan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program BPTD Kelas II Jambi dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Draft Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 - 2024, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi 2020-2024 sesuai Draft Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5	-
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-	-
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	-
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	80	100
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	50	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE 2019	TARGET S.D 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	2	0
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	30	50
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	500	2000
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	50	100
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	50	1
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	80	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	80	90

II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2023 terdiri atas 5 sasaran kegiatan yaitu :

1. Meningkatkan konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat.

3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.
5. Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel.

Sasaran kegiatan pertama, yaitu meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antar moda transportasi terdiri atas 3 (tiga) Indikator kinerja yaitu :

1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional
2. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi
3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

Sasaran kinerja kedua, yaitu Meningkatnya pelayanan transportasi darat terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A
2. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP

Sasaran kinerja ketiga yaitu meningkatnya keselamatan transportasi darat terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
2. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen perhubungan darat
3. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
4. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
5. Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP

Sasaran kinerja keempat, yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri atas indikator kinerja yaitu kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

Sasaran kinerja kelima, yaitu meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel terdiri atas indikator kinerja yaitu tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2023 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN.

Indikator kinerja kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran sebesar Rp.101.360.757.000 ,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80

		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

ANGGARAN

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 14.985.836.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.760.540.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 48.351.251.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 583.680.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.902.143.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

II.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2023

Pada bulan Mei Tahun 2023 dilakukan Revisi I Perjanjian Kinerja kepala BPTD Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan adanya perubahan Direktur Jenderal Perhubungan Darat serta perubahan anggaran pada DIPA Satuan Kerja BPTD Kelas II Jambi dan juga adanya perubahan target pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran BPTD Kelas II Jambi total anggaran nya menjadi Rp. 101.642.747.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Tabel Revisi Perjanjian Kinerja I Tahunan Tahun 2023



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

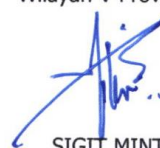
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Mei 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	10
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80

		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
2. Pelayanan Transportasi Darat
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat

ANGGARAN

Rp. 14.985.836.000
Rp. 9.760.540.000
Rp. 48.633.241.000
Rp. 4.143.720.000
Rp. 583.680.000
Rp. 5.902.143.000
Rp. 17.633.587.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Mei 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

II.2.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2023

Pada bulan Agustus Tahun 2023 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja II kepala BPTD Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan adanya perubahan anggaran pada DIPA Satuan Kerja BPTD Kelas II Jambi, perubahan perubahan target pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dan juga adanya perubahan Nomenklatur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dari BPTD Wilayah V Jambi menjadi BPTD Kelas II Jambi serta pergantian Pimpinan Kepala Balai.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran BPTD Kelas II Jambi total anggaran nya menjadi Rp. 101.710.065.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Tabel Revisi Perjanjian Kinerja II Tahunan Tahun 2023



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto, S.Si.T., M.T

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 16 Agustus 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO, S.Si.T., M.T
NIP. 19790220 200112 1 001

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 14.985.836.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.760.540.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 48.633.241.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 583.680.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.902.143.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.700.905.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 16 Agustus 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO, S.Si.T., M.T
NIP. 19790220 200112 1 001

III.2.3 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja III Tahun 2023

Pada bulan November Tahun 2023 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja kepala BPTD Kelas II Jambi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dikarenakan adanya perubahan anggaran pada DIPA Satuan Kerja BPTD Kelas II Jambi.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran BPTD Kelas II Jambi total anggaran nya menjadi Rp. 101.801.947.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Tabel Revisi Perjanjian Kinerja III Tahunan Tahun 2023



REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto, S.Si.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 21 November 2023

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO, S.Si.T., M.T.
NIP. 19790220 200112 1 001

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

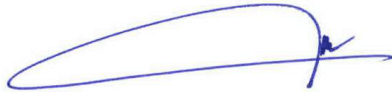
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

ANGGARAN

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 14.427.244.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.760.540.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 47.452.655.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5.216.495.000
5. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 583.680.000
6. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.003.168.000
7. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 18.358.165.000

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 21 November 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO, S.Si.T., M.T.
NIP. 19790220 200112 1 001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Mekanisme pengelolaan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *E-Performance* yang menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Sekretariat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang



direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Prosentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2023

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023;
2. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja pada Tahun 2023 dalam draft Revisi Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.



Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja BPTD Wilayah V Provinsi Jambi, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja kegiatan. Bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.

Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2023

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM				SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4														
			T			R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C													
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi					75,6%						83,3						100%											
IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional				%	100	100	27	27%	100	50,04	50,04%	100	75,06	75,06%	100	100	100%											
IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi				lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%											
IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi				lokasi	4	6	6	100%	6	6	100%	4	4	100%	4	4	100%											
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat					100%						100%						100%											
IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A				%	95	95	95	100%	95	95	100%	95	95	100%	95	95	100%											
IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP				%	100	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%											
SK4	Meningkatnya Keselamatan transportasi darat								15%				64,5%						94,75						100%				
IKK 3.1	Persentase Perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal				%	80	80	24	30%	80	56	70%	80	79	98,75%	80	80	100%											
IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat				%	1	1	0	0%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%											
IKK 3.5	Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan				orang	1500	1500	0	0%	1500	0	0%	1500	1500	100%	1500	1500	100%											
IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor				%	80	80	20	20%	80	42	52,5%	80	60	75%	80	80	100%											
IKK 7b	Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP				Lokasi	1	1	0,25	25%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%											
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					20%						57,47%						75,86						100%					
IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat				nilai	87	87	20	20%	87	50	57,47%	87	66	75,86%	87	87	100%											
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					20%						70%						76,36						100%					
IKK1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat				nilai	88	88	20	20%	88	61,6	70%	88	67,19	76,36%	88	88	100%											
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program									46,12						75,05						87,37						100%		
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program									45,16						83,33						91,75						100%		
Jumlah Indikator Kinerja Program yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)									4						6						7						12		
Jumlah Indikator Kinerja Program kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)									8						6						5						0		



Selama tahun 2023, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 12 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

III.2.1 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan;
2. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi;
3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi.

III.2.1.1 IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keberintisan Angkutan Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pelaksanaan keberintisan angkutan jalan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat



ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut. Capaian kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase pelaksanaan keperintisan} \\ \text{angkutan jalan} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

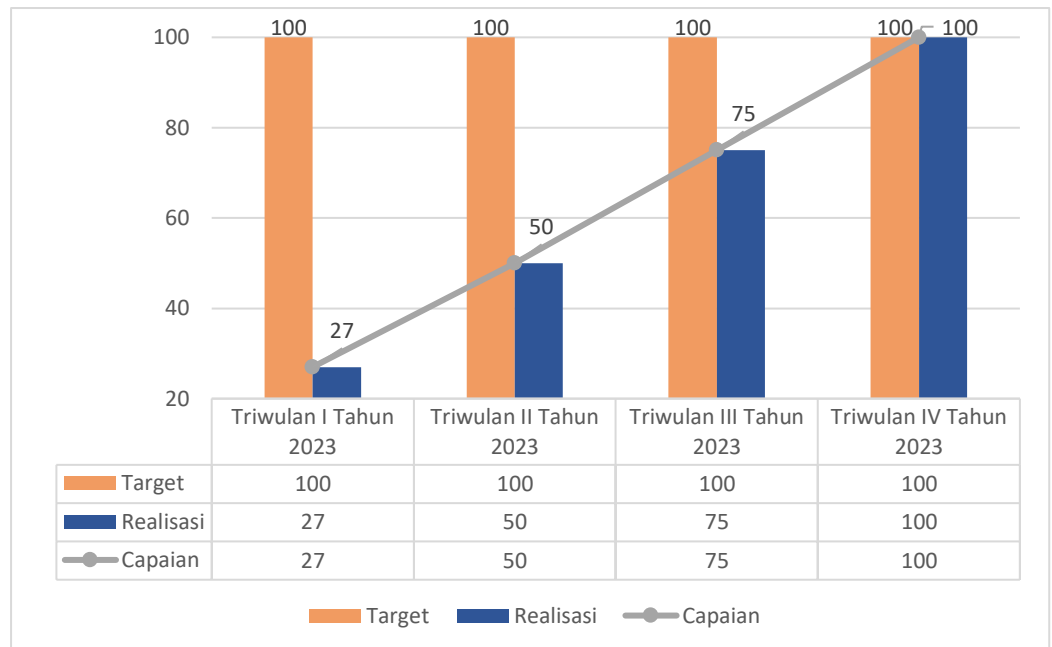
Keterangan:

Trayek yang dilayani adalah:

- a. Senyerang – Teluk Nilau – Kuala Tungkal;
- b. Desa Tanah Tumbuh – Sp. Niam – Terminal Muara Bulian;
- c. Desa Bangun Seranten – Terminal Bungo;
- d. Desa Batu Kerbau – Terminal Tipe A Muara Bungo;
- e. Desa Sari Mulya – Terminal Tipe A Muara Bungo;
- f. Desa Suo-Suo – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
- g. Desa Sentano – Terminal Tipe C Rimbo Bujang;
- h. Desa Mekar Jaya – Terminal Muara Bulian – Terminal Alam Barajo Jambi.

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1** Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dibawah ini :



Gambar III.1 Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 8613 tentang Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2023.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dan target pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.

c. Faktor-faktor keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan;
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum;
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilihan transportasi yang murah.

d. Faktor-faktor kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan;
3. Kurangnya SDM.

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun mencapai 100%.

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Adapun pagu anggaran terkait Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 4.576.674.000. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 4.491.143.980.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Perencanaan yang komprehensif dalam menentukan rute / trayek angkutan perintis di Provinsi Jambi dengan memperhatikan RPJMN, Renstra, serta kebutuhan masyarakat terhadap layanan angkutan perintis di lapangan;
2. Komitmen antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kegiatan peningkatan konektivitas transportasi darat terutama di daerah-daerah terisolir dan belum terlayani angkutan umum;
3. Dapat terus Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dalam pelayanan jasa angkutan umum;
4. Meningkatkan kualitas layanan dari moda angkutan darat;
5. Dapat terus Mewujudkan pelayanan jasa angkutan yang handal;
6. Selalu Menciptakan rasa nyaman dan efisiensi terhadap pengguna jasa angkutan umum;
7. Dapat Mewujudkan konektivitas transportasi darat.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020,2021, dan 2022

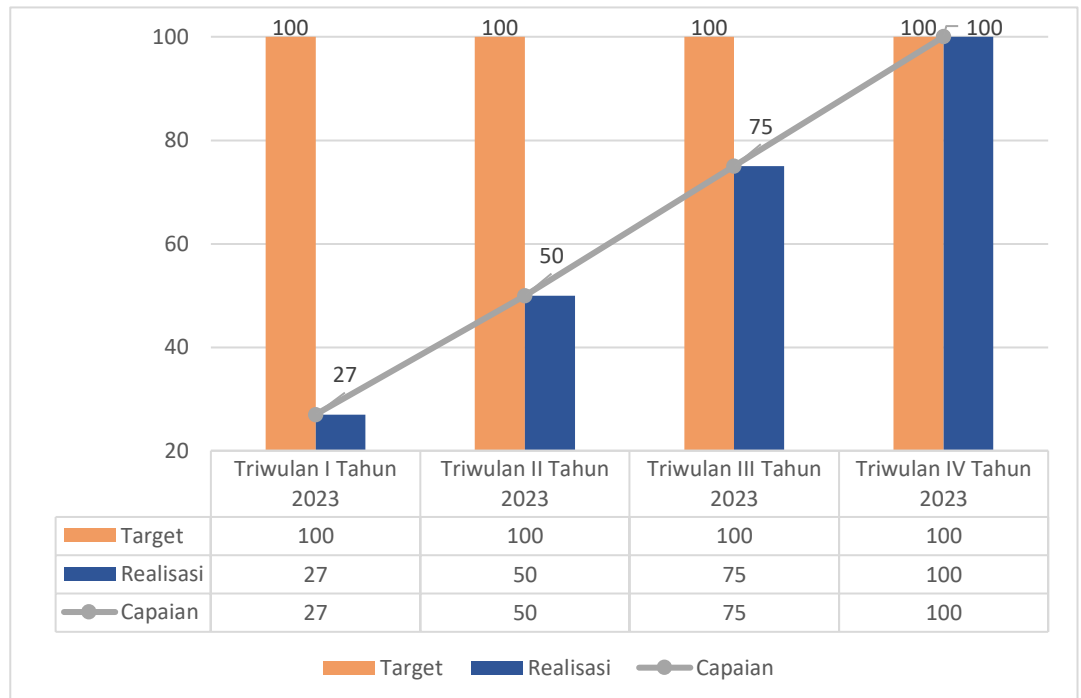
Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 sama dengan tahun 2023 yaitu 100%. Untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021,2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.2 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1.1	100	100	100	Tetap
2	2021		100	100	100	
3	2022		100	100	100	
4	2023		100	100	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik berikut ini :



Gambar III.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2023 dilihat dari Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2022 adalah 100 dan 100. Berikut perbandingan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.3 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	100	100
2	Realisasi	100	100
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan sama dengan Persentase pelaksanaan angkutan jalan pada BPTD Kelas II Jambi. Hal ini disebabkan karena pada Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan sama-sama memiliki target dan realisasi yang sama dan telah tercapai sesuai target.

III.2.1.2 IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyelenggaraan kelancaran operasional Terminal Tipe A dan memastikan tata Kelola sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan secara efisien dan efektif. Terminal Tipe A yang beroperasi di Provinsi Jambi ada 4 Terminal diantaranya adalah:

- Terminal Tipe A Alam Barajo Kota Jambi;
- Terminal Tipe A Sribulan Sarolangun;
- Terminal Tipe A Pulau Tujuh Bangko Merangin;
- Terminal Tipe A Muara Bungo.

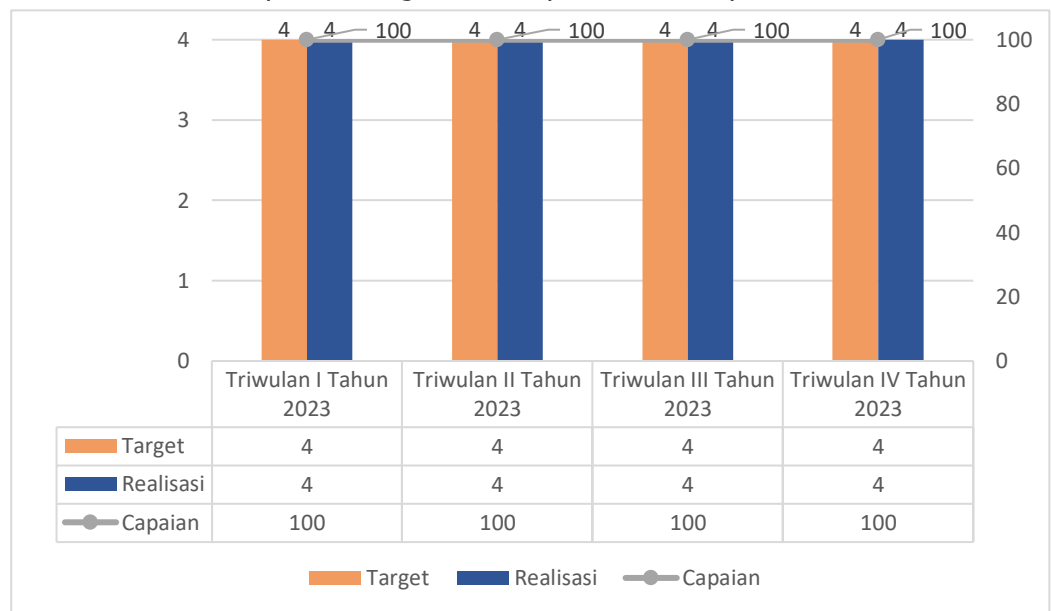
Capaian kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah terminal tipe-A dan terminal
barang yang beroperasi

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK.



Gambar III.3 Grafik Capaian IKK Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal barang yang beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi

memiliki target 4 Lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023 untuk indikator kinerja kegiatan tersebut.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tingginya antusias masyarakat menggunakan angkutan umum;
2. Informasi tentang pelayanan di terminal tersampaikan kepada masyarakat;
3. Banyak masyarakat yang menggunakan terminal sebagai tempat perpindahan koridor;

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia;
- Tidak adanya anggaran operasional;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Capaian Jumlah pelaksanaan Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian persentase pelaksanaan Terminal Tipe A dan Terminal Barang berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 9.174.025.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 9.169.945.452,-.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna fasilitas terminal Tipe-A;
5. Meningkatkan kemampuan pelayanan guna mengantisipasi kebutuhan dimasa yang akan datang;
6. Meningkatkan minat Masyarakat agar lebih banyak menggunakan Transportasi Umum;
7. Meningkatkan pendapatan PNBP di Terminal Tipe-A.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

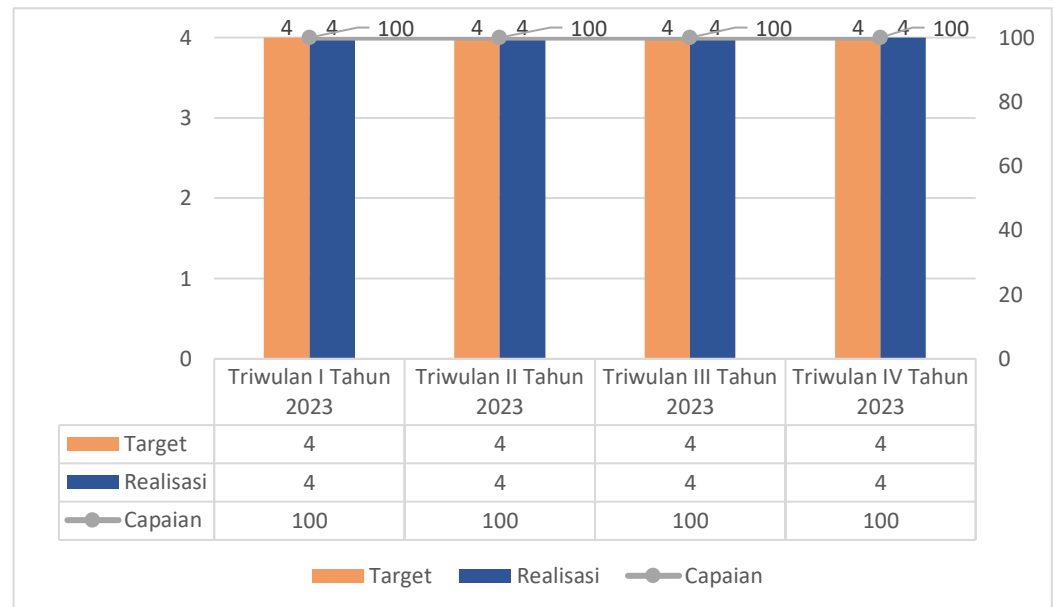
Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 4 lokasi, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020, 2021 dan 2022 sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Jadi realisasi pada tahun 2023 sama dengan tahun 2020, 2021, dan 2022 yaitu 100%. untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.4 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1.3	4	4	100	Tetap
2	2021		4	4	100	
3	2022		4	4	100	
4	2023		4	4	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik berikut ini :



Gambar III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2023 dilihat dari Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi Tahun 2022 adalah 1 dan 100. Berikut perbandingan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang

beroperasi BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.5 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	4	1
2	Realisasi	4	1
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi pada BPTD Kelas II Jambi lebih besar dibandingkan dengan Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi lebih kecil namun sama-sama telah tercapai sesuai target meskipun dengan target dan realisasi yang berbeda.

III.2.1.3 IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Jambi memiliki Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Pelabuhan Penyeberangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM.

Pada target awal Perjanjian Kinerja untuk IKK Kegiatan tersebut berjumlah 6 pelabuhan, adapun rincian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah BPTD Kelas II Jambi yaitu:

1. Pelabuhan sungai penyeberangan kuala tungkal (Beroperasi);
2. Pelabuhan sungai Sarolangun (Tidak Beroperasi);
3. Pelabuhan sungai Kuala Jambi (Beroperasi);
4. Pelabuhan sungai Nipah Panjang (Beroperasi);
5. Pelabuhan sungai Muara Sabak (Beroperasi);
6. Pelabuhan sungai Angso duo (Beroperasi);

7. Pelabuhan sungai Jambi (Beroperasi);
8. Pelabuhan sungai Muara Bulian (Tidak Beroperasi).

Pada Revisi II Perjanjian Kinerja untuk IKK Kegiatan tersebut terjadi perubahan target dikarenakan adanya Perubahan Nomenklatur pada BPTD di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan nomenklatur terbaru PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Berdasarkan PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Pelabuhan Sungai Danau, dan Penyeberangan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yaitu:

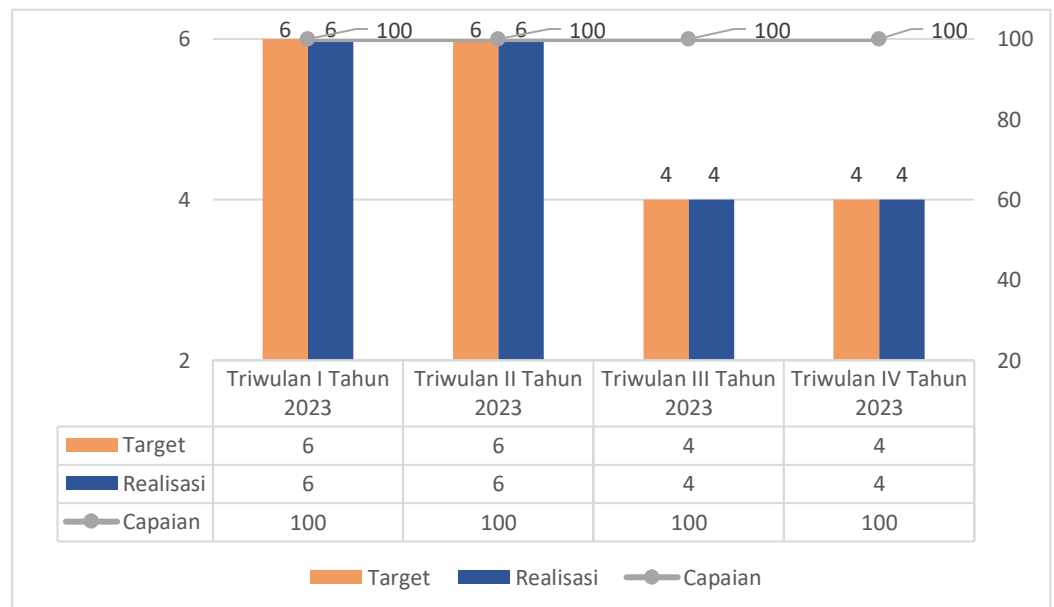
1. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal;
2. Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo;
3. Pelabuhan Sungai Nipah Panjang;
4. Pelabuhan Sungai Mendahara.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK



Gambar III.5 Grafik Capaian IKK Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada target awal Perjanjian Kinerja untuk IKK Kegiatan tersebut berjumlah 6 pelabuhan, adapun rincian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di wilayah BPTD Kelas II Jambi yaitu:

1. Pelabuhan sungai penyeberangan kuala tungkal (Beroperasi);
2. Pelabuhan sungai Sarolangun (Tidak Beroperasi);
3. Pelabuhan sungai Kuala Jambi (Beroperasi);
4. Pelabuhan sungai Nipah Panjang (Beroperasi);
5. Pelabuhan sungai Muara Sabak (Beroperasi);
6. Pelabuhan sungai Angso duo (Beroperasi);
7. Pelabuhan sungai Jambi (Beroperasi);
8. Pelabuhan sungai Muara Bulian (Tidak Beroperasi).

Pada Revisi II Perjanjian Kinerja untuk IKK Kegiatan tersebut terjadi perubahan target dikarenakan adanya Perubahan Nomenklatur pada BPTD di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Berdasarkan nomenklatur terbaru PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Berdasarkan PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Pelabuhan Sungai Danau, dan Penyeberangan pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yaitu:

1. Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal;
2. Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo;
3. Pelabuhan Sungai Nipah Panjang;
4. Pelabuhan Sungai Mendahara

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tersedianya anggaran;
2. Melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasaran Pelabuhan;
3. Pengawasan operasional Pelabuhan;
4. Petugas yang kompeten dibidangnya;
5. Koordinasi yang selalu terjalin dengan stakeholder terkait;
6. Selalu melaksanakan evaluasi kerja.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Minimnya pelaksanaan peningkatan kualitas sarana dan prasaran Pelabuhan;
3. Tidak optimalnya pengawasan operasional pelabuhan.

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Indikator Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 586.515.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 586.423.169,-.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;
2. Melakukan pengawasan secara periodik;
3. Melakukan pembangunan prasarana pelabuhan berdasarkan rencana induk Pelabuhan yang telah disusun;
4. Terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di sungai danau dan penyeberangan;
5. Menjamin kesesuaian spesifikasi teknis fisik kendaraan;
6. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelabuhan SDP.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Tahun 2023 sebesar 4 lokasi, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 1 lokasi, realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 7 lokasi dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 7 lokasi. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 100% dengan rincian capaian pada Tahun 2022 dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.6 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1.6	1	1	100	Turun
2	2021		7	7	100	
3	2022		7	7	100	
4	2023		4	4	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 4 lokasi, jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola

Transportasi Darat sebesar 7 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik berikut ini:



Gambar III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

a.7. **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 dilihat dari Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2022 adalah 8 dan 10. Berikut perbandingan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi pada BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.7 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	4	8
2	Realisasi	4	8
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui realisasi Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2023 pada BPTD Kelas II Jambi lebih rendah dari Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terdapat 8 Pelabuhan yang beroperasi sedangkan pada BPTD Kelas II Jambi hanya terdapat 4 Pelabuhan yang beroperasi, namun untuk capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sama-sama telah tercapai sesuai target dan realisasi masing-masing.

III.2.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenang secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A;

2. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

III.2.1.1 IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pada IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A, Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur Pasal 64 ayat (2) PM No. 24 Tahun 2021 meliputi :

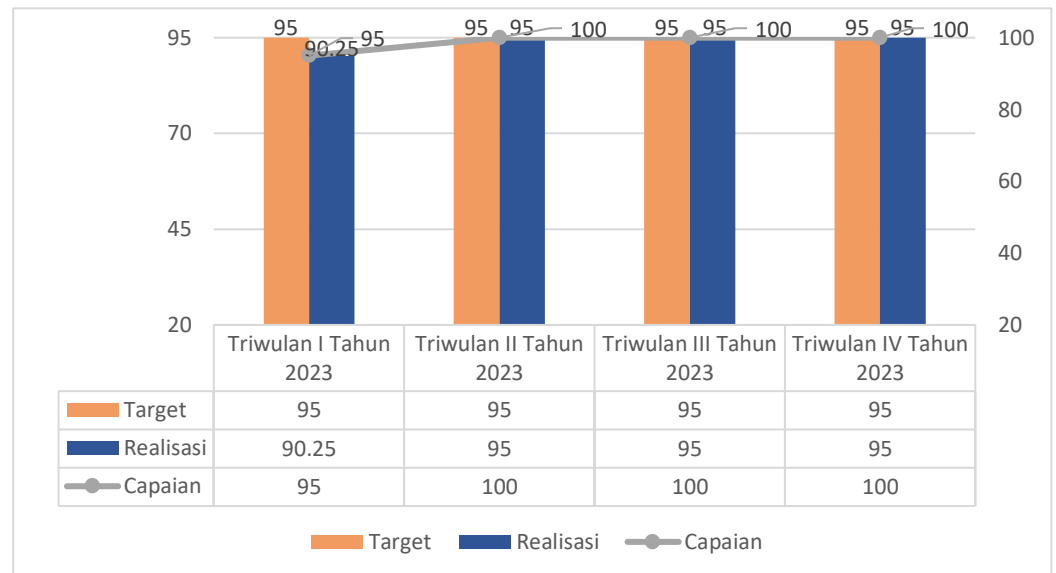
- a. Kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- c. Pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. Keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2022 sebesar 95% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 95%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.7** Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.



Gambar III.7 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.4951/AJ.002/DRJD/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksana Kebersihan, Ketertiban, dan Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal tipe-A terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 95%. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.



c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

1. Sumber daya manusia yang mencukupi, terampil, dan berintegritas;
2. Komitmen Petugas dalam Pelayanan yang ada di Terminal Tipe-A;
3. Fasilitas yang ada dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. Terpenuhiya Keamanan, Kebersihan, Ketertiban yang ada di Terminal.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja persentase Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi sebagai berikut :

- Kurangnya sumber daya manusia;
- Tidak adanya anggaran operasional;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.

e. Rumus Capaian:

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2022 sebesar 100%.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{95}{95} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 105.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 105.000.000,-.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kepada para penumpang;
2. Meningkatkan fasilitas para penumpang;
3. Melakukan pengawasan secara optimal terhadap transportasi jalan;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di Terminal Tipe-A.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

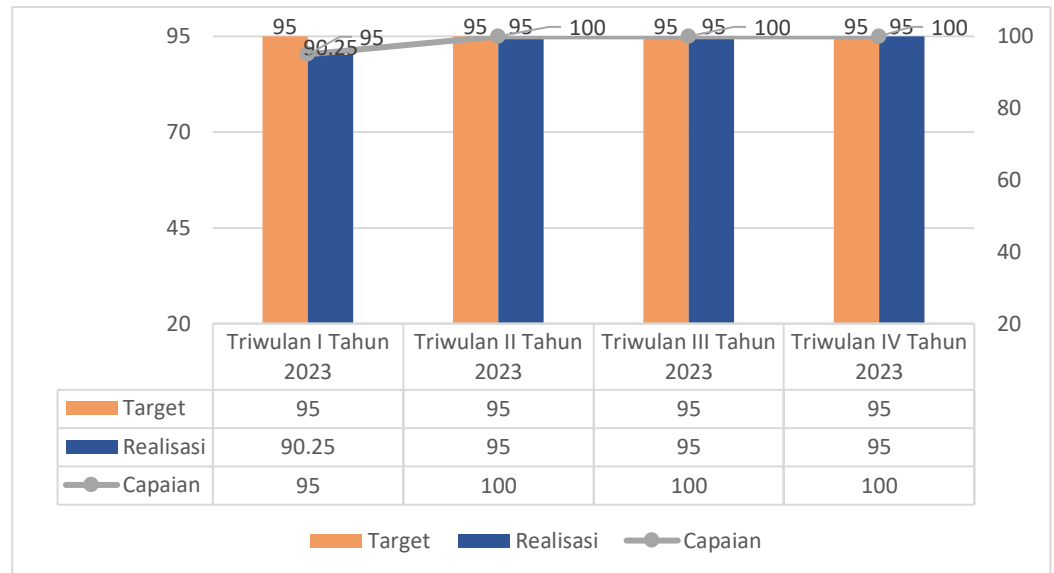
Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 sebesar 95%, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar....., realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 80% dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 80%. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.8 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 2.1	80	80	100	Naik
2	2021					
3	2022					
4	2023					

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A sebesar 95% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar 95% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik berikut ini:



Gambar III.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

a.7. **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2023 dilihat dari Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2022 adalah 90 dan 100. Berikut perbandingan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.9 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	95	90
2	Realisasi	95	90
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Jambi lebih besar dibandingkan dengan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pada Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Kalimantan Selatan 90% sedangkan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A BPTD Kelas II Jambi 95% namun sama-sama telah tercapai sesuai target meskipun dengan target dan realisasi yang berbeda.

III.2.1.2 IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Jambi memiliki fungsi dan tugas terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP yang bertujuan untuk lebih meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

Capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 100%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.9** Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2023.



Gambar III.9 Grafik Capaian IKK Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP Tahun 2023

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.



b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP terhadap pelayanan transportasi darat memiliki target 100%. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
2. SDM yang kompeten dibidangnya;
3. Pelaksanaan pengawasan secara periodik.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebagai berikut :

- Sarana dan prasarana tidak memadai;
- Kurangnya SDM;
- Tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan.

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal sudah dilaksanakan dengan baik dengan pengawasan dari Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Indikator Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 75.000.000,-. Realisasi anggaran yang telah terealisasi s.d Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 75.000.000,-.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap SPM di Pelabuhan SDP di Provinsi Jambi;
2. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan angkutan penyeberangan terkait SPM pelayanan angkutan penyeberangan;
3. Memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang melanggar ketentuan yang ada.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 2%, realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 100% dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.10 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 2.1	2	2	100	Tetap
2	2021		100	100	100	
3	2022		100	100	100	
4	2023		100	100	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP

Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.



Gambar III.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024

a.7. **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2023 dilihat dari Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2022 adalah 100 dan 100. Berikut perbandingan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.11 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	100	100
2	Realisasi	100	100
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP pada BPTD Kelas II Jambi sama dengan Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pada Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP memiliki target dan realisasi yang sama dan telah tercapai sesuai target.

III.2.3 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal;
2. IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan;
4. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor;
5. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

III.2.1.1 IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal

a.1 Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi untuk menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan, membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan, serta melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang sesuai kondisi ideal.

Pada indikator Kinerja kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terdapat beberapa kegiatan yaitu :

1. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK);
2. Pemeliharaan perlengkapan jalan;
3. Perlengkapan jalan (Prioritas Nasional);
4. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan.

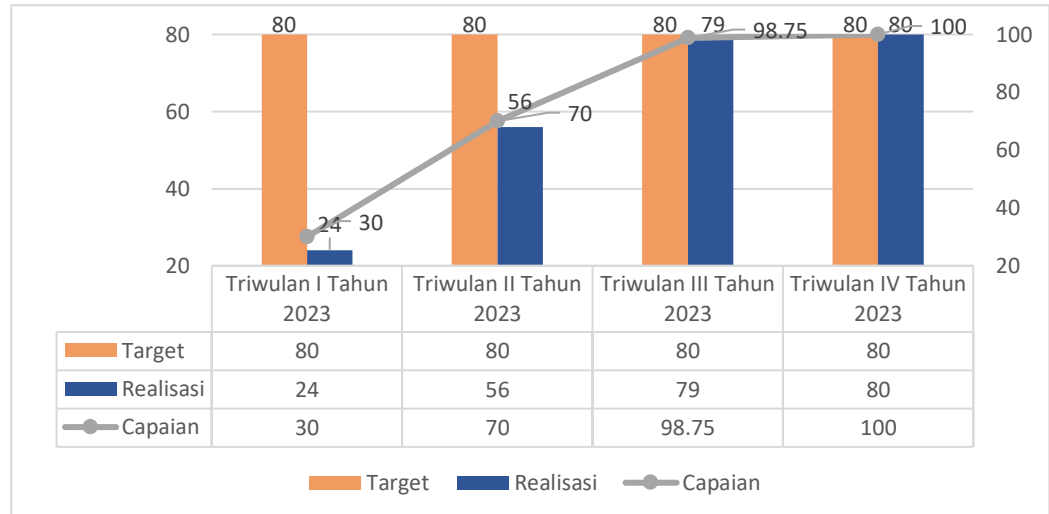
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

**Persentase perlengkapan jalan
yang telah terpasang terhadap
kondisi ideal**

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2023 sebesar 80% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.11**. Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.



Gambar III.11 Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
4. Renstra BPTD Wilayah V Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 80%.



Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

- Tersedianya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan yang tepat waktu;
- Optimalnya pengawasan pembangunan.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu;
- Kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan.

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2022.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran untuk Capaian Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar:

1. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) anggaran sebesar Rp. 1.493.074.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.493.074.000.
2. Pemeliharaan perlengkapan jalan anggaran sebesar Rp. 697.129.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 697.127.460.
3. Perlengkapan jalan (Prioritas Nasional) anggaran sebesar Rp. 14.349.327.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.346.983.400.

4. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan anggaran sebesar Rp. 4.603.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.603.400.000.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang rusak;
2. Berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan yang sudah terpasang;
3. Berusaha melaksanakan pembangunan yang tepat waktu.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang Tahun 2023 sebesar 80%, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 4%, realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 70% dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 70%. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

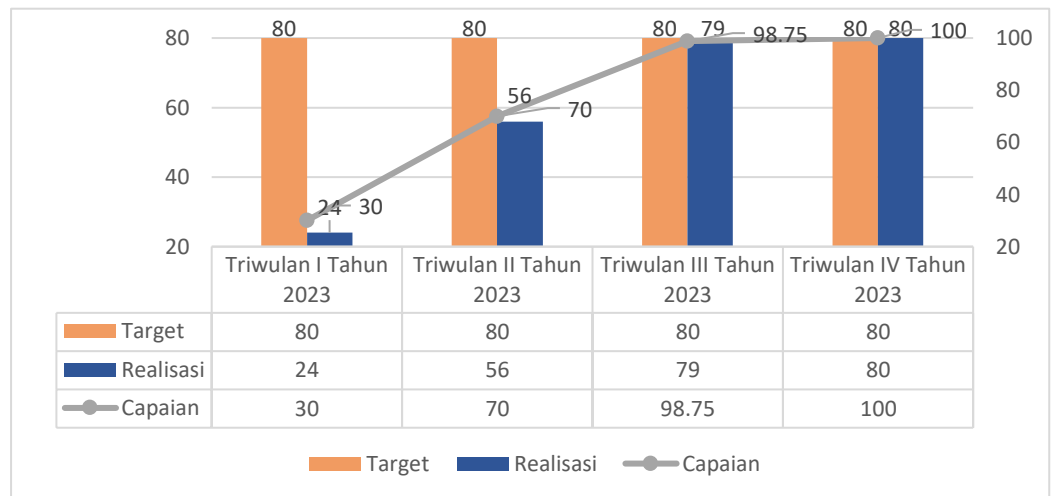
Tabel III.12 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 2.1	7	4	57,14	Naik
2	2021		70	70	100	
3	2022		70	70	100	
4	2023		80	80	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang sebesar 80%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola

Transportasi Darat sebesar 80% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.12** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang Tahun 2023 terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.



Gambar III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pelaksanaan jalan yang telah terpasang tahun 2023 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

a.7. **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2023 dilihat dari Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2022 adalah 100 dan 100. Berikut perbandingan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.13 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	80	100
2	Realisasi	80	100
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Tahun 2022 pada BPTD Kelas II Kalimantan Selatan lebih tinggi dari Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal BPTD Kelas II Jambi. Hal ini disebabkan karena pada BPTD Kelas II Jambi dan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki target dan realisasi yang berbeda, namun untuk capaian kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sama-sama telah tercapai sesuai target.

III.2.1.2 IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

Pada IKK tersebut Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor disebut UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu, dan juga meminimalisir pelanggaran *Over Dimensi* dan *Over Load*.

BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Fasilitas Penimbangan yang dilaksanakan oleh Satpel UPPKB untuk pencatatan, pengawasan, dan penindakan Angkutan Barang terhadap:

1. Tata cara pemuatan barang;
2. Dimensi kendaraan Angkutan Barang;

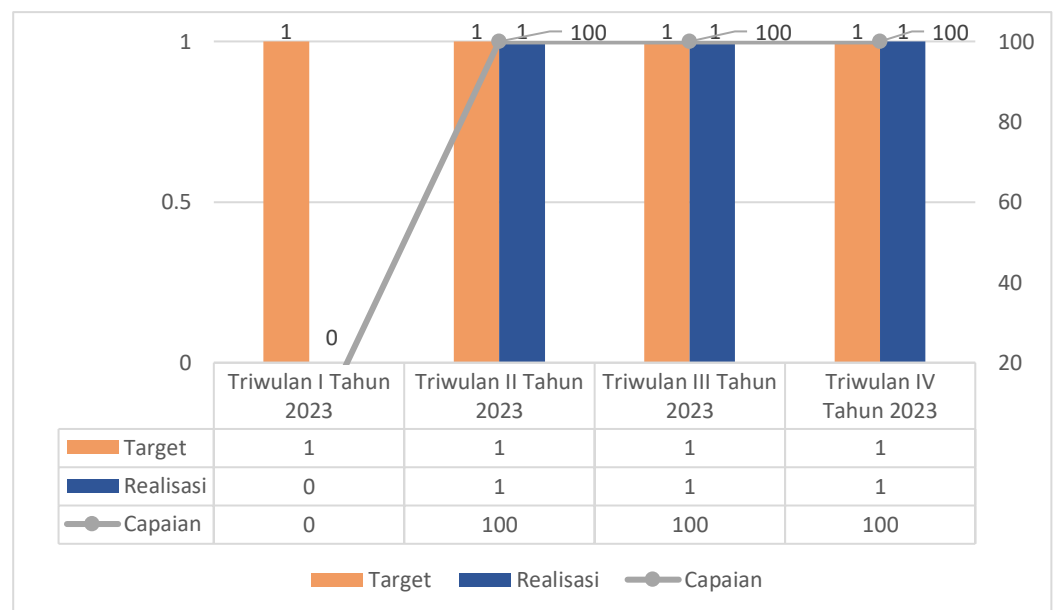
3. Tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
4. Dokumen Angkutan Barang;
5. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
6. Jenis barang yang diangkut, berat angkutandan asal tujuan.

Untuk menghitung Indikator Capaian Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat} = \frac{(Target - (Realisasi - Target))}{Target} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 sebesar 1% jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 1%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.13**. Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.



Gambar III.13 Grafik Capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 85 Tahun-2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki target 1%. Sepanjang tahun 2023 tidak ada perubahan target Perjanjian Kinerja (PK).

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

1. Patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
2. Para sopir dan armada angkutan mematuhi segala peraturan yang berlaku dan bersedia menerima sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai berikut :

- Tidak patuhnya pemilik kendaraan barang terhadap aturan yang berlaku;
- Kurangnya SDM;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai.



e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 4.990.735.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 4.987.381.358,-.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha/masyarakat terkait Over Dimensi Over Load (ODOL) kendaraan barang;
2. Memberikan sanksi tegas kepada sopir yang melanggar ketentuan Over Dimensi Over Load (ODOL);
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

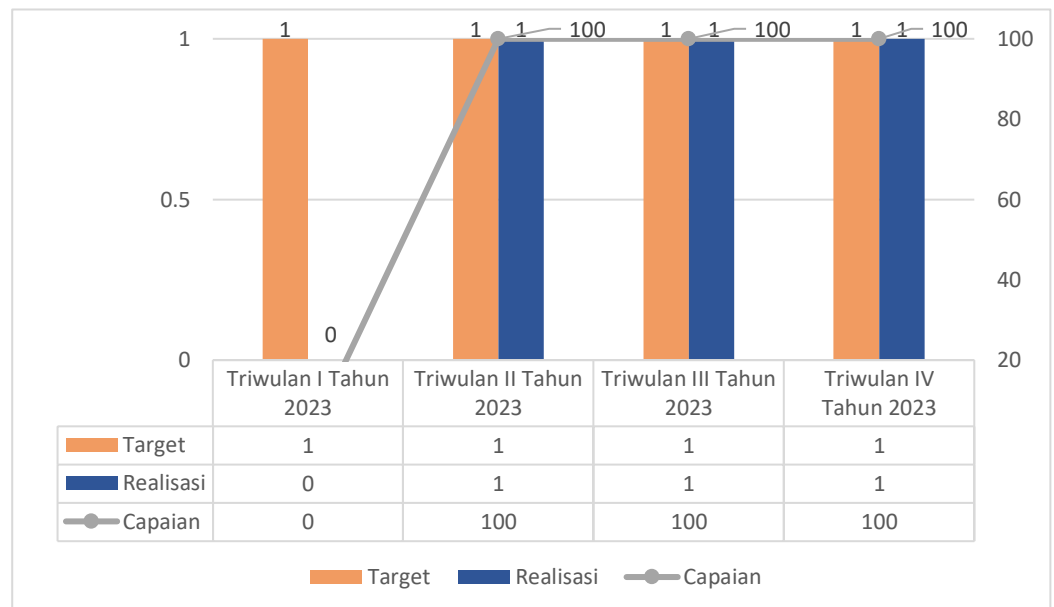
Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 sebesar 1%, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%, realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 3% dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 2,5%. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.14 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 3.2	100	100	100	Turun
2	2021		2	3	50	
3	2022		1,5	2,5	33,33	
4	2023		1	1	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebesar 1% jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar 1% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.14** Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024



Gambar III.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2023 dilihat dari realisasi Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2022 adalah 60 dan 100. Berikut perbandingan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.15 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	1	60
2	Realisasi	1	60
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kelas II Jambi lebih rendah dari Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pada BPTD Kelas II Jambi telah berhasil menurunkan lebih tinggi tingkat pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat meskipun antara BPTD Kelas II Jambi dan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan memiliki target dan realisasi yang berbeda dalam capaian kinerja, namun sama-sama telah mencapai target yang telah ditetapkan.

III.2.1.3 IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja

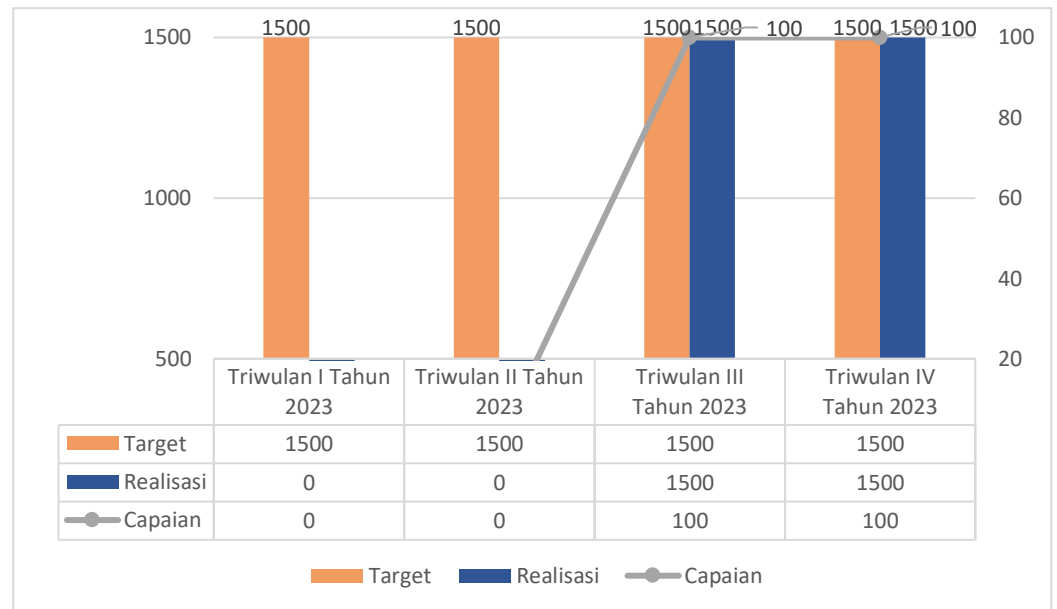
Kegiatan pada IKK tersebut untuk mengkampanyekan keselamatan dalam berlalu lintas kepada masyarakat. Capaian kinerja pada indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan ini terdapat beberapa kegiatan dengan capaian kinerja pada Tahun 2023 sebesar 100%.

Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023 sebesar 1.500 orang jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 1.500 orang maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.15** Grafik Capaian IKK Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023.



Gambar III.15 Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2023

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Kecepatan terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 1.500. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :



1. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat secara kontinyu dan terus menerus;
2. Adanya koordinasi dan komitmen antara instansi pemerintah terkait dengan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
3. Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebagai berikut :

1. Tidak adanya sosialisasi keselamatan;
2. Tidak adanya koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas;
3. Tidak tersampainya informasi keselamatan bagi masyarakat yang tidak memperhatikan sosialisasi;

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2022.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1500}{1500} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 300.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 299.351.955,-.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Melakukan edukasi kesadaran tertib berlalu lintas;
2. Melakukan pemeliharaan terhadap ZoSS yang terpasang;
3. Melakukan koordinasi dan komitmen antara pemerintah instansi terkait dan masyarakat terkait keselamatan lalu lintas.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

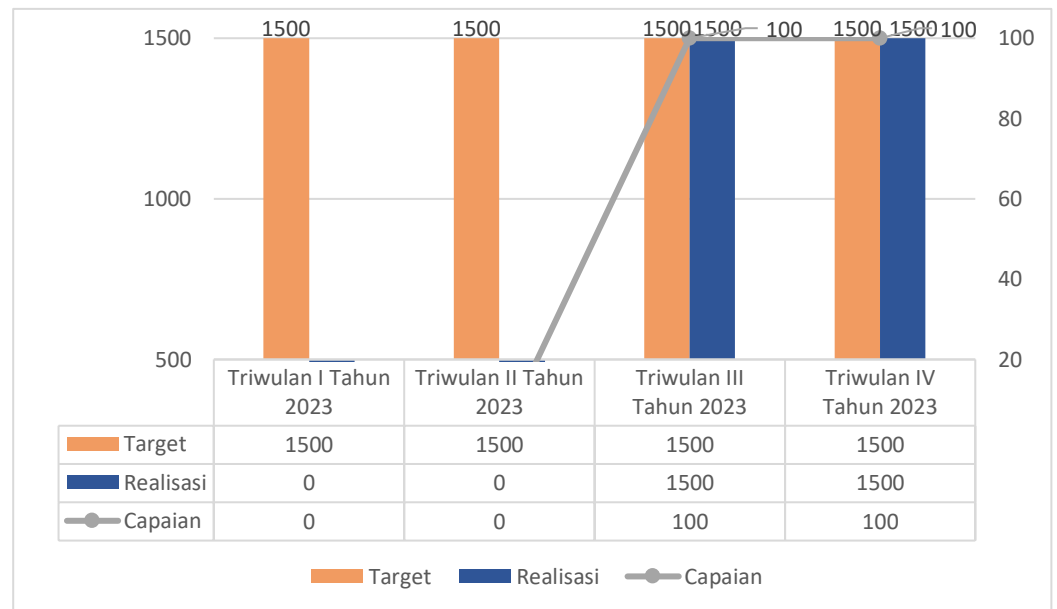
Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023 sebesar 1.500 orang, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 0 orang, realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 750 orang dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 1.000 orang. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.16 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 3.5	0	0	0	Naik
2	2021		750	750	100	
3	2022		1.000	1.000	100	
4	2023		1.500	1.500	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Persentase Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 1.500 orang, jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar 1.500 orang, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.16** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024:



Gambar III.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024

a.7. **Benchmark Nasional**

Untuk benchmark Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023 dilihat dari Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Persentase realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2022 adalah 1000 dan 100. Berikut perbandingan realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.17 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	1500	1000
2	Realisasi	1500	1000
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan Tahun 2023 BPTD Kelas II Jambi lebih tinggi dibandingkan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pada BPTD Kelas II Jambi memiliki target dan realisasi yang lebih besar untuk Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan, namun untuk capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sama-sama telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

III.2.1.4 IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan alat uji disetiap PKB laik fungsi berjalan sesuai SOP pada seluruh kab/kota yang ada di Provinsi Jambi.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan bahwa Unit pelaksana Uji Berkala wajib melaksanakan pengujian setelah memperoleh akreditasi dan sertifikasi, menggunakan peralatan pengujian yang terkalibrasi dan dilengkapi dengan sistem informasi manajemen pengujian Kendaraan Bermotor yang terintegrasi

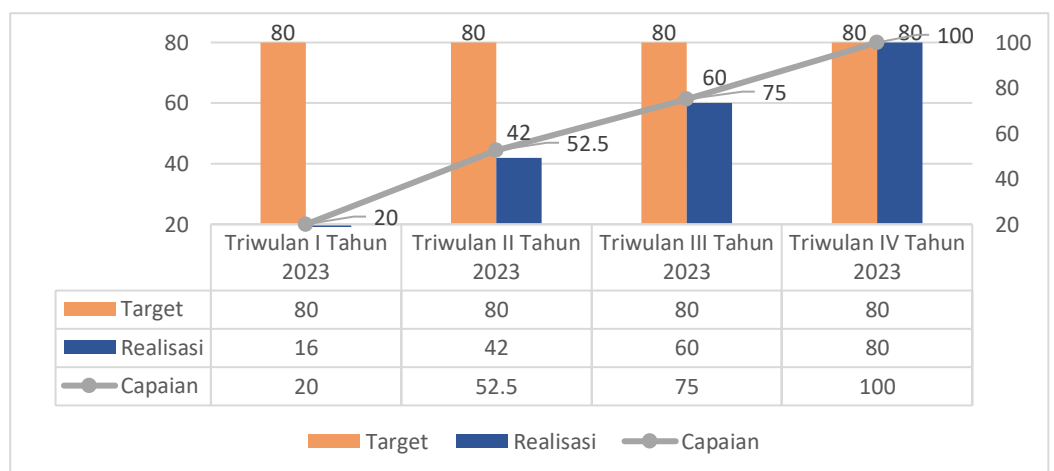
dengan hasil uji berupa Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLU-E). Standarisasi pengujian kendaraan dalam hal ini sebagai pemenuhan standar Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota dengan penetapan Akreditasi UPUBKB sebagai bermotor adalah aspek pemenuhan pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor yang ditetapkan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023 sebesar 80%, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 80%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.17** Grafik Capaian IKK Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023.



Gambar III.17 Grafik Capaian IKK Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK. 1471/aj.402/drjd/2017 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 80%. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Permintaan dari Dishub Kab/ Kota;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya SDM yang terampil dan memiliki kompetensi.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Kurangnya SDM.

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2022.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 110.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,-.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor;
2. Meningkatkan SDM penguji kendaraan bermotor;
3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

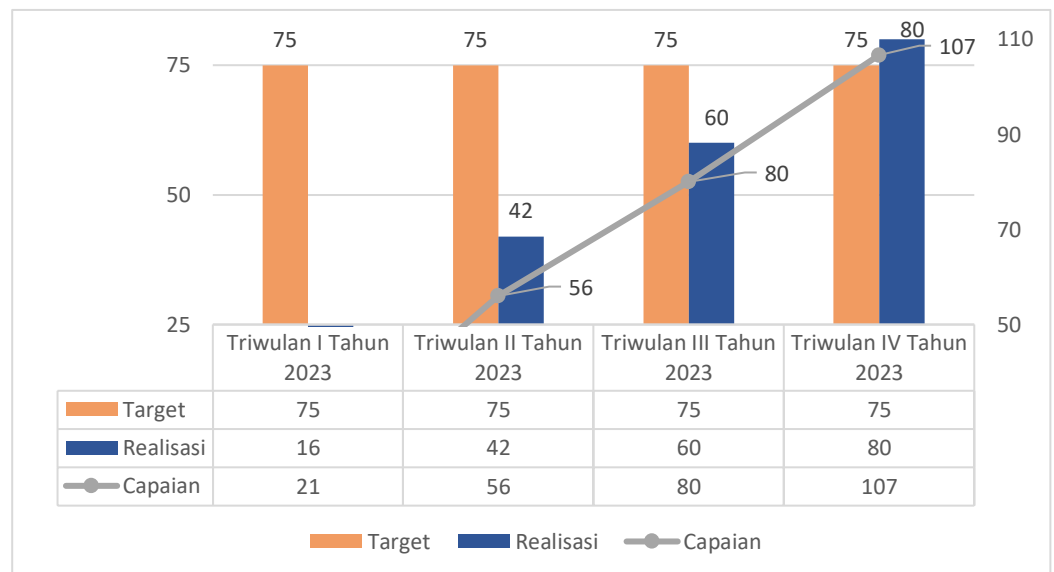
Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023 sebesar 80%, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 0%, realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 50% dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 80%. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.18 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 7a	0	0	0	Tetap
2	2021		50	50	100	
3	2022		80	80	100	
4	2023		80	80	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 80%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar 75%, maka capaian kinerja mencapai 107%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.18** Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.



Gambar III.18 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan Tahun 2023 dilihat dari Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2022 adalah 85 dan 100. Berikut perbandingan

Persentase pengujian berkala kendaraan bermotor BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.19 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	80	85
2	Realisasi	80	85
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Tahun 2023 BPTD Kelas II Jambi lebih rendah dibandingkan Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pada BPTD Kelas II Jambi dan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terdapat target dan realisasi yang berbeda, namun sama-sama telah tercapai sesuai target masing-masing yang telah ditetapkan.

III.2.1.5 IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1. Definisi Indikator Kinerja

BPTD Kelas II Jambi memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan untuk menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP dan membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP serta melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

Jumlah Ketersediaan Fasilitas
Keselamatan Alur Pelayaran SDP

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023 sebesar 1 lokasi, jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 1 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.19** Grafik Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023:



Gambar III.19 Grafik Capaian Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023

a.3. Analisis Keberhasilan dan kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran sungai dan danau;
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
3. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.



b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP memiliki target 1 lokasi. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Kondisi lapangan yang mendukung, seperti cuaca
2. Kontrak pekerjaan tepat waktu
3. Kesesuaian dengan kebutuhan

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Pekerjaan tidak selesai dengan waktu yang telah ditentukan;
3. Perkiraan Tidak sesuai dengan kebutuhan.

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 1.050.000.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 1.045.208.000,-.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu dengan :

1. Mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan SDP;
2. Mewujudkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan SDP serta memberikan kemudahan bagi pengguna SDP dalam berlalu lintas;
3. Mewujudkan perairan yang berkeselamatan;
4. Menginventarisasi kembali jumlah rambu sungai yang akan dipasang;
5. Memasang rambu sungai di daerah yang belum terpasang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2023 sebesar 1 lokasi, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 sebesar 3 lokasi, realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 0 lokasi dan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebesar 0 lokasi. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.20 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 7b	3	3	100	
2	2021		0	0	0	
3	2022		0	0	0	
4	2023		1	1	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP sebesar 1 lokasi, jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat sebesar 200 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 0,5%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.20** Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Terhadap Target Kinerja Pada Tahun

2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
Tahun 2020-2024:



Gambar III.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2023 dilihat dari realisasi Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP Tahun 2022 adalah 1 dan 100. Berikut perbandingan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.21 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	1	1
2	Realisasi	1	1
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa realisasi Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP BPTD Kelas II Jambi sama dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena memiliki target, realisasi dan capaian kerja yang sama.

III.2.4 Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat.

III.2.1.1 IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1. Definisi Indikator Kinerja

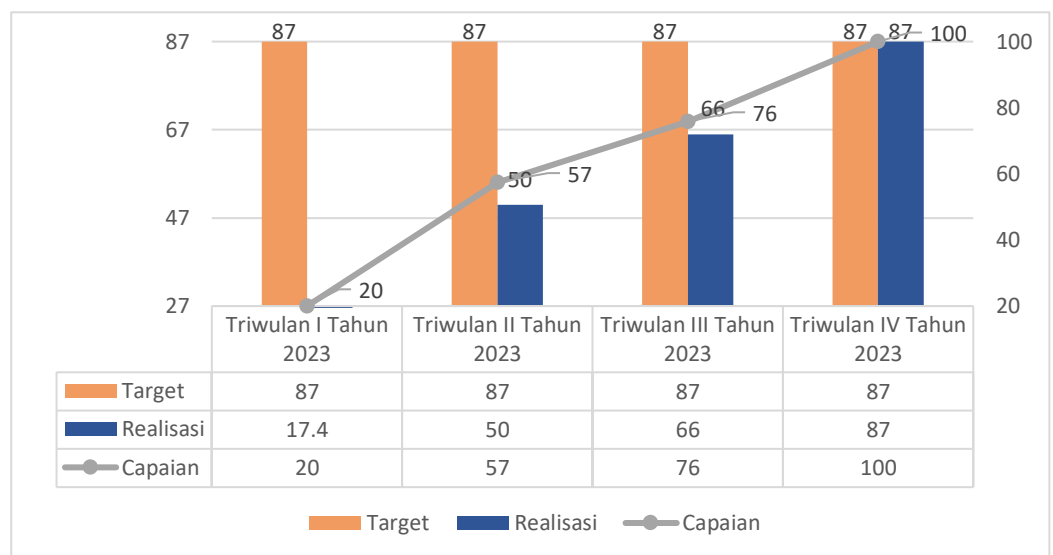
Capaian kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut:

Kualitas penyelenggaraan dukungan
teknis transportasi darat

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 sebesar 87 dengan satuan nilai. jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 87, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.21** Grafik Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023:



Gambar III.21 Grafik Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023

a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat memiliki target Nilai sebesar 87. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya anggaran.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebagai berikut :

- Tidak adanya anggaran;
- Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
- Kurangnya SDM.

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{87}{87} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 4.821.495.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 4.813.214.400,-.

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melaksanakan tugas dan fungsi BPTD Kelas II Jambi secara optimal;
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

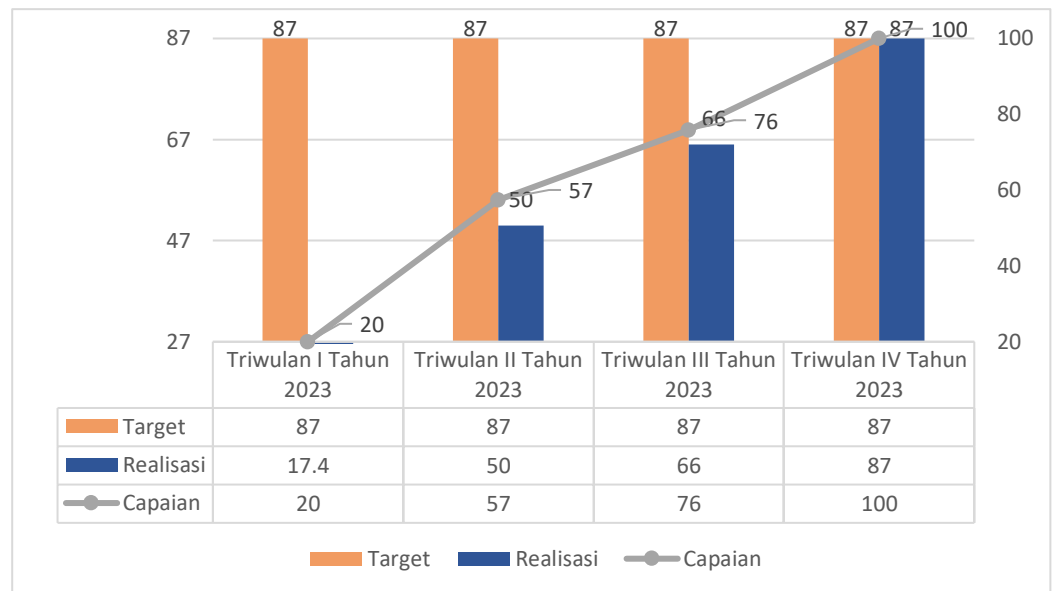
Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 sebesar 87 dengan satuan Nilai, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 dengan Nilai sebesar 1, realisasi kinerja pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 85 dan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 85. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.22 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 5.1	12	1	8,3	Naik
2	2021		85	85	100	
3	2022		85	85	100	
4	2023		87	87	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan nilai sebesar 87%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat dengan nilai sebesar 87%, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.22** Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024:



Gambar III.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.

a.7. **Benchmark Nasional**

Untuk *benchmark* kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 dilihat dari kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2022 adalah 85 dan 100. Berikut perbandingan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.23 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	87	83
2	Realisasi	87	85
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Jambi lebih tinggi dari kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pada BPTD Kelas II Jambi dan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terdapat target dan realisasi yang berbeda, namun sama-sama telah tercapai sesuai target masing-masing yang telah ditetapkan.

III.2.5 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat dan Akuntabel

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat maupun pada Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

III.2.1.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

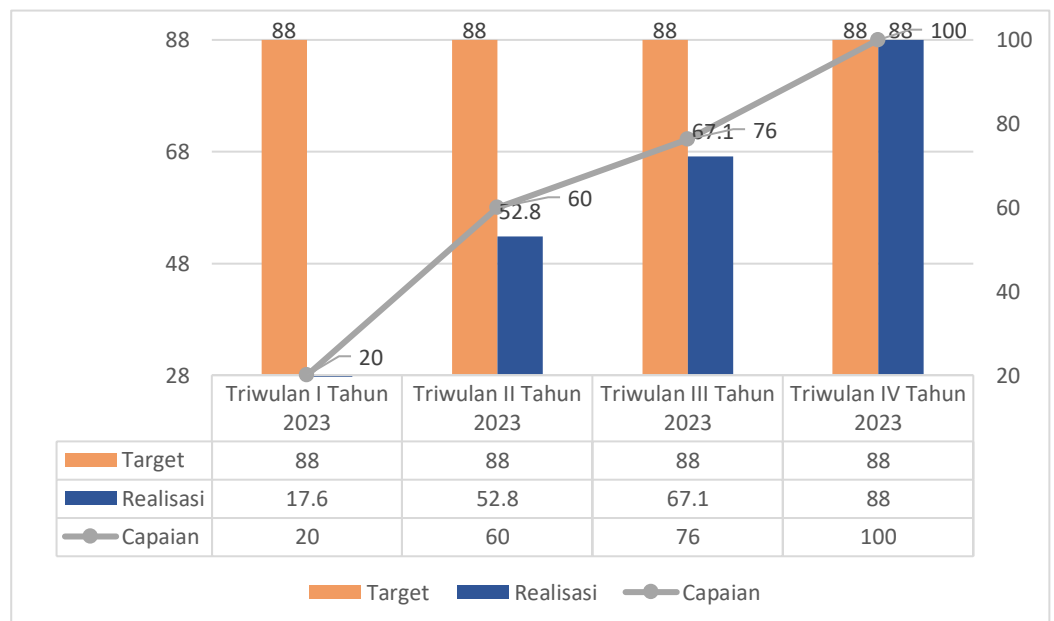
a.1. Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan, maka dari itu digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat Tahun 2023 sebesar 88 dengan satuan nilai. jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2023 sebesar 88, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.23** Grafik Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023.



Gambar III.23 Grafik Capaian Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023.



a.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Renstra BPTD Kelas II Jambi Tahun 2020 – 2024.

b. Kronologi Target Perjanjian Kinerja

Pada Tahun 2023 Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat memiliki target Nilai sebesar 88. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat perubahan target Perjanjian Kinerja (PK) 2023.

c. Faktor-faktor Keberhasilan :

Adapun faktor-faktor keberhasilan dalam mencapai Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. SDM yang cukup dan berkualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Tersedianya anggaran.

d. Faktor-faktor Kegagalan :

Adapun faktor-faktor kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat sebagai berikut :

1. Tidak adanya anggaran;
2. Sarana dan prasarana yang tidak memadai;
3. Kurangnya SDM.

e. Rumus Capaian :

Keberhasilan capaian Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat Tahun 2022.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{88}{88} \times 100\% = 100\%$$

f. Anggaran Indikator Kinerja Kegiatan

Penganggaran Indikator Tingkat penyelenggaraan perkantoran ditjen perhubungan darat berdasarkan Nomenklatur di POK yaitu sebesar Rp. 24.945.013.000,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 24.933.941.483

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan layanan penyelenggaraan perkantoran BPTD Kelas II Jambi.
2. Memperbaiki sarana dan prasarana yang belum memadai
3. Membentuk SDM yang berkualitas.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022

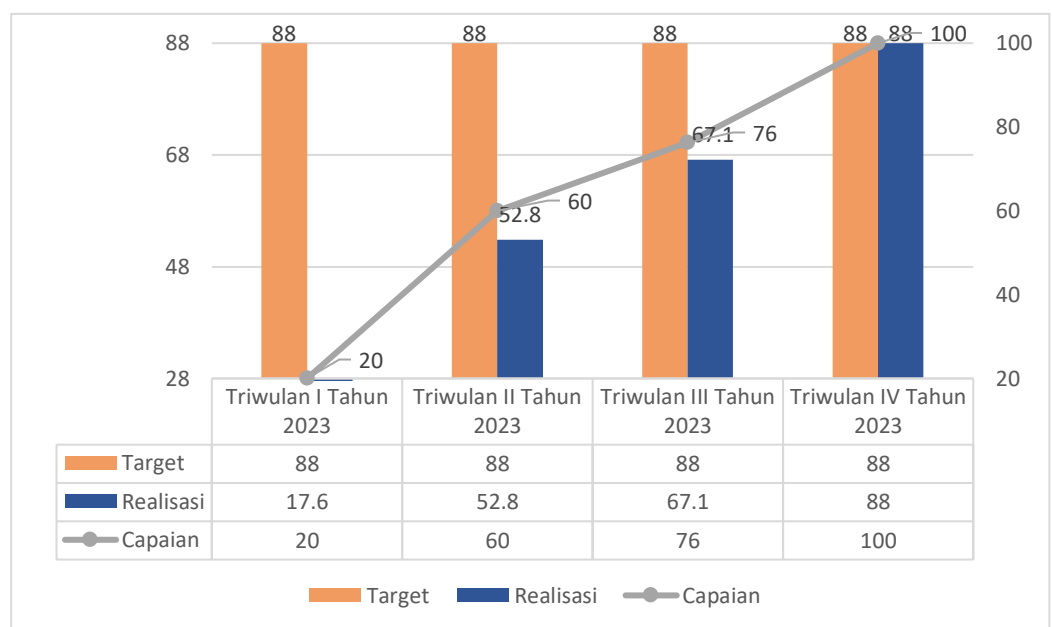
Realisasi kinerja pada Indikator Kinerja Kegiatan Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Tahun 2023 dengan Nilai sebesar 88, jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2020 dengan Nilai sebesar 61, realisasi kinerja pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 84 dan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 85. Jadi realisasi pada tahun 2023 terdapat perbedaan realisasi dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Untuk rincian capaian pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.24 Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Pada Tahun 2020, 2021, 2022 dan Tahun 2023

No.	Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	100	61	61	Naik
2	2021		85	84	98,82	
3	2022		85	85	100	
4	2023		87	87	100	

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target kinerja Tahun 2023 pada Renstra BPTD Tahun 2020-2024

Realisasi kinerja pada Indikator Kegiatan Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan Nilai sebesar 88, jika dibandingkan dengan target kinerja pada Tahun 2023 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat dengan Nilai sebesar 88, maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.24** Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024.



Gambar III.24 Perbandingan Realisasi Kinerja Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2023 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Tahun 2020-2024

a.7. Benchmark Nasional

Untuk *benchmark* Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2023 dilihat dari Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTD Kelas II Kalimantan Selatan pada Tahun 2022, realisasi dan capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 adalah 80 dan 100. Berikut perbandingan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan

Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.25 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian BPTD Kelas II Jambi Tahun 2023 dengan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan Tahun 2022

No.	Uraian	BPTD Kelas II Jambi	BPTD Kelas II Kalimantan Selatan
1	Target	87	80
2	Realisasi	87	80
3	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Jambi lebih tinggi dari Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat BPTD Kelas II Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan karena pada BPTD Kelas II Jambi dan BPTD Kelas II Kalimantan Selatan terdapat target dan realisasi yang berbeda, namun sama-sama telah tercapai sesuai target masing-masing yang telah ditetapkan.

III.2.6 Capaian Lainnya

Adapun Capaian Lainnya yang tercapai pada BPTD Kelas II Jambi Tahun Anggaran 2023 Rehabilitasi / Peningkatan UPPKB Pelawan Sarolangun yang bersumber dari SBSN dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 19.181.990.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.072.654.690.

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2023

III.3.1.1. Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2023 Per Triwulan IV

Pagu Per Triwulan IV DIPA TA. 2023 sebesar Rp. 101.801.947.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.26 Rincian per Sumber Dana pagu Tahun 2023 per triwulan IV

Sumber Dana	Pagu
RM	80.782.957.000
PNBP	1.837.000.000
SBSN	19.181.990.000
Total	101.801.947.000

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2023 Per Triwulan IV

Tabel III.27 Rincian per Jenis Belanja Pagu Tahun 2023 per Triwulan IV

Jenis Belanja	Pagu
Belanja Pegawai	18.358.165.000
Belanja Barang	48.186.204.000
Belanja Modal	35.257.578.000
Total	101.801.947.000

a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Berikut uraian surat pengesahan revisi anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 :

1. Pagu Anggaran awal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-



- 022.03.2.403845/2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.360.757.000.
2. Revisi Ke-1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 27 Desember 2022 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.360.757.000. Terdapat Automatic Adjustment pada Belanja Pegawai (Tunjangan khusus / kegiatan / kinerja sebesar Rp. 2.462.697.000.
 3. Revisi Ke-2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 12 April 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.642.747.000. Pada Revisi tersebut ada penambahan anggaran Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBSN yang tidak terserap pada Tahun 2022 kegiatan Rehabilitasi / Peningkatan UPPKB Pelawan sebesar Rp. 281.990.000.
 4. Revisi Ke-3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 17 April 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.642.747.000.
 5. Revisi Ke-4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 06 Juli 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.710.065.000.
 6. Revisi Ke-5 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 13 Juli 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.710.065.000.
 7. Revisi Ke-6 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 22 Agustus 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.710.065.000.
 8. Revisi Ke-7 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 06 Oktober 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.194.687.000.
 9. Revisi Ke-8 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-



- 022.03.2.403845/2023 tanggal 15 Oktober 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.194.687.000.
10. Revisi Ke-9 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 08 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.144.687.000.
 11. Revisi Ke-10 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 13 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.801.947.000.
 12. Revisi Ke-11 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 13 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.801.947.000.
 13. Revisi Ke-12 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 29 November 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.801.947.000.
 14. Revisi Ke-13 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.801.947.000.
 15. Revisi Ke-14 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-022.03.2.403845/2023 tanggal 28 Desember 2023 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 101.801.947.000.

III.3.1.2. Refocusing Anggaran Tahun 2023

a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan IV

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 14 (empat belas) kali revisi DIPA, maka berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel III.28 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan IV

Pagu	Sumber Dana			Jumlah
	RM	PNBP	SBSN	
Pagu Awal	80.623.757.000	1.837.000.000	18.900.000.000	101.360.757.000
Revisi Ke-1	80.623.757.000	1.837.000.000	18.900.000.000	101.360.757.000
Revisi Ke-2	80.623.757.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.642.747.000
Revisi Ke-3	80.623.757.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.642.747.000
Revisi Ke-4	80.691.075.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.710.065.000
Revisi Ke-5	80.691.075.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.710.065.000
Revisi Ke-6	80.691.075.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.710.065.000
Revisi Ke-7	80.175.697.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.194.687.000
Revisi Ke-8	80.175.697.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.194.687.000
Revisi Ke-9	80.125.697.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.144.687.000
Revisi Ke-10	80.782.957.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.801.947.000
Revisi Ke-11	80.782.957.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.801.947.000
Revisi Ke-12	80.782.957.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.801.947.000
Revisi Ke-13	80.782.957.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.801.947.000
Revisi Ke-14	80.782.957.000	1.837.000.000	19.181.990.000	101.801.947.000

a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV

Berdasarkan dengan adanya revisi DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi yang dilakukan penyesuaian anggaran sebanyak 14 (empat belas) kali revisi DIPA, maka berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja.

Tabel III.29 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV

Pagu	Jenis Belanja			Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu Awal	17.633.587.000	47.895.203.000	35.831.967.000	101.360.757.000
Revisi Ke-1	17.633.587.000	47.895.203.000	35.831.967.000	101.360.757.000
Revisi Ke-2	17.633.587.000	47.895.203.000	36.113.957.000	101.642.747.000
Revisi Ke-3	17.633.587.000	47.895.203.000	36.113.957.000	101.642.747.000
Revisi Ke-4	17.700.905.000	47.895.203.000	36.113.957.000	101.710.065.000
Revisi Ke-5	17.700.905.000	47.895.203.000	36.113.957.000	101.710.065.000
Revisi Ke-6	17.700.905.000	47.895.203.000	36.113.957.000	101.710.065.000
Revisi Ke-7	17.700.905.000	48.229.998.000	35.263.784.000	101.194.687.000
Revisi Ke-8	17.700.905.000	48.229.998.000	35.263.784.000	101.194.687.000
Revisi Ke-9	17.700.905.000	48.186.204.000	35.257.578.000	101.144.687.000



Pagu	Jenis Belanja			Jumlah
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
Revisi Ke-10	18.358.165.000	48.186.204.000	35.257.578.000	101.801.947.000
Revisi Ke-11	18.358.165.000	48.186.204.000	35.257.578.000	101.801.947.000
Revisi Ke-12	18.358.165.000	48.186.204.000	35.257.578.000	101.801.947.000
Revisi Ke-13	18.358.165.000	48.186.204.000	35.257.578.000	101.801.947.000
Revisi Ke-14	18.358.165.000	48.186.204.000	35.257.578.000	101.801.947.000

**a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja
Tahun 2023 per Triwulan IV**

Berikut rincian realokasi per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja
Tahun 2023 Per Triwulan sebagai berikut:

Tabel III.30 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV

Sumber Dana dan Jenis Belanja	Pagu awal	Perubahan	Pagu Per Triwulan I	Perubahan	Pagu Per Triwulan II	Perubahan	Pagu Per Triwulan III	Perubahan	Pagu Per Triwulan IV
Belanja Pegawai	17.633.587	-	17.633.587	-	17.633.587	67.318	17.700.905	657.260	18.358.165
RM	17.633.587	-	17.633.587	-	17.633.587	67.318	17.700.905	657.260	18.358.165
PNBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang	47.895.203	-	47.895.203	-	47.895.203	-	47.895.203	291.001	48.186.204
RM	47.895.203	-	47.895.203	-	47.895.203	-	47.895.203	291.001	48.186.204
PNBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SBSN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Modal	35.831.967	-	35.831.967	281.990	36.113.957	-	36.113.957	-856.379	35.257.578
RM	15.094.967	-	15.094.967	-	15.094.967	-	15.094.967	-856.379	14.238.588
PNBP	1.837.000	-	1.837.000	-	1.837.000	-	1.837.000	-	1.837.000
SBSN	18.900.000	-	18.900.000	281.990	19.181.990	-	19.181.990	-	19.181.990

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2023 per Triwulan IV

Berikut rincian realokasi per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2023 Per Triwulan sebagai berikut:

Tabel III.31 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Per Kegiatan Tahun 2023 per Triwulan IV

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN IV
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.241.347	-	77.241.347	281.990	77.523.337	-	77.523.337	-666.403	76.856.934
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	14.985.836	-	14.985.836	-	14.985.836	-	14.985.836	-558.592	14.427.244
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.760.540	-	9.760.540	-	9.760.540	-	9.760.540	-	9.760.540
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	48.351.251	-	48.351.251	281.990	48.633.241	-	48.633.241	-1.180.586	47.452.655
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720	-	4.143.720	-	4.143.720	-	4.143.720	1.072.775	5.216.495
WA	Program Dukungan Manajemen	24.119.410	-	24.119.410	-	24.119.410	67.318	24.186.728	758.285	24.945.013
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	583.680	-	583.680	-	583.680	-	583.680	-	583.680

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BPTD KELAS II JAMBI TAHUN 2023



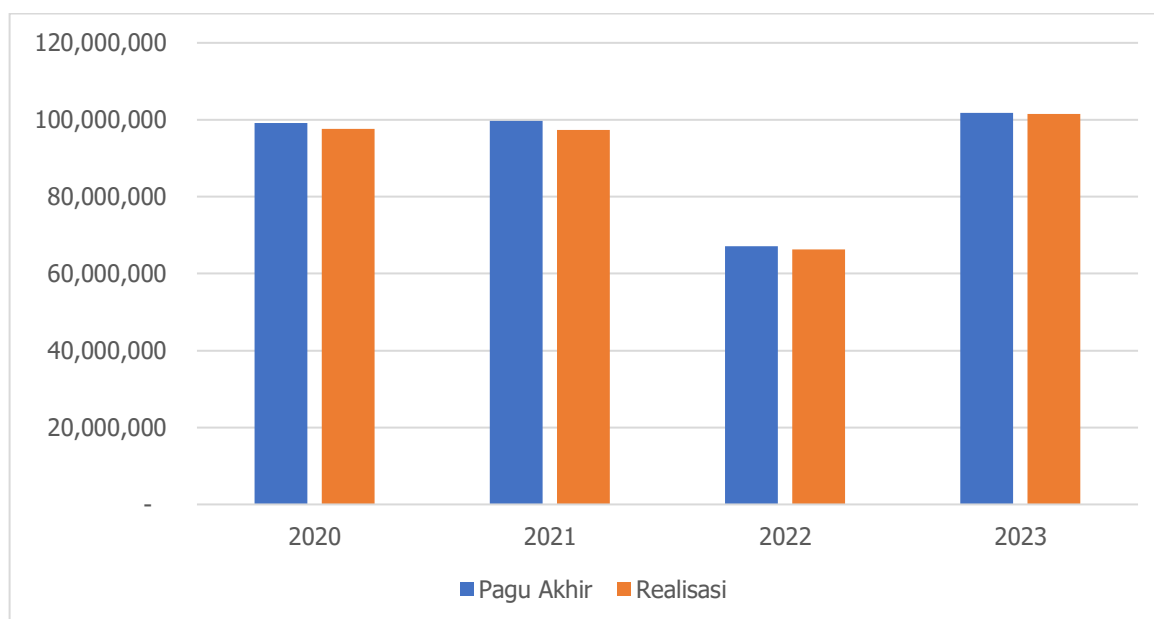
KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU PER TRIWULAN IV
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.902.143	-	5.902.143	-	5.902.143	-	5.902.143	101.025	6.003.168
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587	-	17.633.587	-	17.633.587	67.318	17.700.905	657.260	18.358.165

III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2023

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2020 – 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.32 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2023

No.	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	88.949.535.000	99.150.386.000	97.656.432.484	98.49%
2	2021	129.371.473.000	99.765.868.000	97.287.819.468	97.52%
3	2022	65.786.704.000	67.113.382.000	66.305.986.469	98.80%
4	2023	101.360.757.000	101.801.947.000	101.570.955.734	99.77%



Gambar III.25 Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2023 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa nilai pagu awal, pagu akhir dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Tahun **2020** anggaran yang terserap sebesar Rp. 97.656.432.484,- atau mencapai 98.49% dari pagu akhir sebesar Rp. 99.150.386.000,-. Tahun **2021** anggaran yang terserap sebesar Rp.



97.287.819.468,- atau mencapai 97.52% dari pagu akhir sebesar
Rp. 99.765.868.000,-. Tahun **2022** anggaran yang terserap sebesar
Rp. 66.305.986.469,- atau mencapai 98.80% dari pagu akhir sebesar
Rp. 67.113.382.000,-. Tahun **2023** anggaran yang terserap sebesar
Rp. 101.570.955.734,- atau mencapai 99.77% dari pagu akhir sebesar
Rp. 101.801.947.000,-.

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Berikut adalah rincian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 :

III.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 per Triwulan IV

Adapun Rincian Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III.33 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2023

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI PAGU PER TRIWULAN II	%	PAGU PER TRIWULAN III	REALISASI PAGU PER TRIWULAN III	%	PAGU PER TRIWULAN IV	REALISASI PAGU PER TRIWULAN IV	%
GA	Program Infrastruktur Konektivitas	77.241.347.000	77.241.347.000	10.158.486.437	13,15	77.523.337.000	31.911.640.171	41,16	76.906.934.000	56.217.527.449	73,10	76.856.934.000	76.637.015.765	99,71
GA.4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	14.985.836.000	14.985.836.000	1.124.644.587	7,50	14.985.836.000	4.900.776.714	32,70	14.836.406.000	8.242.485.770	55,56	14.427.244.000	14.340.501.581	99,40
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	9.760.540.000	9.760.540.000	1.562.182.257	16,01	9.760.540.000	2.772.008.506	28,40	9.760.540.000	5.652.777.244	57,91	9.760.540.000	9.756.368.621	99,96
GA.4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	48.351.251.000	48.351.251.000	7.206.845.478	14,91	48.633.241.000	23.186.110.528	47,68	47.466.268.000	40.050.146.104	84,38	47.452.655.000	47.324.261.163	99,73
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	4.143.720.000	4.143.720.000	264.814.115	6,39	4.143.720.000	1.052.744.423	25,41	4.843.720.000	2.272.118.331	46,91	5.216.495.000	5.215.884.400	99,99
WA	Program Dukungan Manajemen	24.119.410.000	24.119.410.000	8.169.756.660	33,87	24.119.410.000	12.983.882.858	53,83	24.287.753.000	18.383.515.250	75,69	24.945.013.000	24.933.939.969	99,96

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BPTD KELAS II JAMBI TAHUN 2023



KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	REALISASI PAGU PER TRIWULAN I	%	PAGU PER TRIWULAN II	REALISASI PAGU PER TRIWULAN II	%	PAGU PER TRIWULAN III	REALISASI PAGU PER TRIWULAN III	%	PAGU PER TRIWULAN IV	REALISASI PAGU PER TRIWULAN IV	%
WA.4596	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	583.680.000	583.680.000	243.100.000	41,65	583.680.000	281.789.189	48,28	583.680.000	398.449.270	68,27	583.680.000	582.734.270	99,84
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	5.902.143.000	5.902.143.000	1.716.975.199	29,09	5.902.143.000	2.805.344.461	47,53	6.003.168.000	4.087.457.871	68,09	6.003.168.000	6.001.645.909	99,97
WA.4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	17.633.587.000	17.633.587.000	6.209.681.461	35,22	17.633.587.000	9.896.749.208	56,12	17.700.905.000	13.897.608.109	78,51	18.358.165.000	18.349.559.790	99,95

III.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV

Tabel III.34 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	%
Belanja Pegawai	18.358.165.000	18.349.559.790	99,95
Belanja Barang	48.186.204.000	48.092.664.933	99,81
Belanja Modal	35.257.578.000	35.128.731.011	99,63
Total	101.801.947.000	101.570.955.734	99,77

III.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan IV

Tabel III.35 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan IV

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	%
RM	80.782.957.000	80.667.900.044	99,86
PNBP	1.837.000.000	1.830.401.000	99,64
SBSN	19.181.990.000	19.072.654.690	99,43
Total	101.801.947.000	101.570.955.734	99,77

III.3.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2023, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.36 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023 per Triwulan IV

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	Sisa Pagu	%
Belanja Pegawai	18.358.165.000	18.349.559.790	8.605.210	99,95
Belanja Barang	48.186.204.000	48.092.664.933	93.539.067	99,81
Belanja Modal	35.257.578.000	35.128.731.011	128.846.989	99,63
Total	101.801.947.000	101.570.955.734	230.991.266	99,77

Tabel III.37 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2023 per Triwulan IV

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi Pagu	Sisa Pagu	%
RM	80.782.957.000	80.667.900.044	115.056.956	99,86
PNBP	1.837.000.000	1.830.401.000	6.599.000	99,64
SBSN	19.181.990.000	19.072.654.690	109.335.310	99,43
Total	101.801.947.000	101.570.955.734	230.991.266	99,77

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.38 Capaian Rata-rata Kinerja per Sasaran Program per Triwulan Tahun 2023

No	Sasaran Program		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antarmoda Transportasi	75,6%	83,3%	91,68%	100%
2	SK2	Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	100%	100%	100%	100%
3	SK4	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	15%	64,5%	94,75%	100%
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi darat	20%	57,47%	75,86%	100%
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20%	70%	76,36%	100%
Rata-Rata			46,12%	75,05%	87,37	100%

III.3.4. Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain :

1. Masih kurangnya pemenuhan dalam Sumber Daya Manusia yang mana tugas dan fungsinya di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi;
2. Sistem perencanaan yang masih kurang matang mengenai pemahaman kebutuhan anggaran;
3. Dalam Kegiatan Kontrak, faktor cuaca/faktor alam tidak menentu yang menjadikan kendala dalam pelaksanaannya.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Ringkasan Capaian

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 ini terdapat 12 (Dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi Triwulan IV tahun 2023. Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan IV tahun 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan terealisasi sebesar 100% (target 100%);
 - 2) Jumlah terminal tipe a dan terminal barang yang beroperasi terealisasi sebesar 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 3) Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi terealisasi 4 lokasi (target 4 lokasi);
 - 4) Persentase pelaksanaan SPM di Terminal Tipe A terealisasi 95% (target 95%);
 - 5) Persentase pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP terealisasi 100% (target 100%);
 - 6) Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terealisasi 80% (target 80%);
 - 7) Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat terealisasi 1% (target 1%);
 - 8) Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan terealisasi 1.500 orang (target 1.500orang);
 - 9) Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terealisasi 80% (target 80%);
 - 10) Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP terealisasi 1 Lokasi (target 1 lokasi);
 - 11) Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat tercapai 87 (target 87);



- 12) Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tercapai 88 (target 88).
2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi akan melakukan monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi.
3. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju *Zero Accident*.

IV.2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam PK	Triwulan IV			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
					Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja			
1.	SK 1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	Tercapai	Menyediakan atau memberikan subsidi untuk angkutan umum perintis bagi masyarakat di daerah-daerah yang saat ini belum terjangkau untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut.	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BPTD KELAS II JAMBI TAHUN 2023



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam ...	Triwulan IV				Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	100	Tercapai	1. Melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Terminal Tipe A; 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM; 3. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Terminal Tipe A.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4				Tercapai	Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait tugas dan tanggung jawab serta komitmen untuk pelaksanaan operasional di Pelabuhan Penyeberangan.	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
2.	SK 2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	95	95	100	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Terminal tipe-A	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	100	100	100	Tercapai	Melaksanakan monitoring terhadap SPM di Pelabuhan SDP	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan	
3.	SK 4. Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	80	80	100	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BPTD KELAS II JAMBI TAHUN 2023



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target dalam ...	Triwulan IV			Evaluasi	Rencana Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
		IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1	1	100	Tercapai	1. Menyiapkan infrastruktur UPPKB yang memadai; 2. Menyiapkan SDM yang berkompeten	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1500	1500	100	Tercapai	Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan telah dilaksanakan	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	80	80	100	Tercapai	1. Melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri; 2. Melaksanakan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB; 3. Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor.	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1	1	100	Tercapai	1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP; 2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP; 3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
4.	SK 5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	87	87	100	Tercapai	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan	Subbag Tata Usaha
5.	SK 1. Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88	88	88	100	Tercapai	Melaksanakan layanan perkantoran dan Layanan Dukungan Manajemen Internal	Subbag Tata Usaha



LAMPIRAN



**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2023
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

JAMBI, JANUARI 2023

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH V PROVINSI JAMBI**

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0

		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

Jambi, Januari 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

Sigit MIntarso

NIP. 19680130 199003 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	6
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80

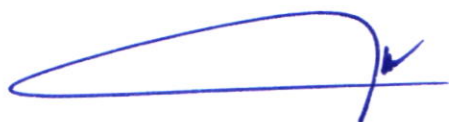
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

ANGGARAN

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 14.985.836.000 |
| 2. | Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 9.760.540.000 |
| 3. | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 48.351.251.000 |
| 4. | Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 4.143.720.000 |
| 5. | Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat | Rp. 583.680.000 |
| 6. | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 5.902.143.000 |
| 7. | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. 17.633.587.000 |

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Januari 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023**

[illegible]

[illegible]

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pengadaan alat kalibrasi uji berkala kendaraan bermotor	-	-	-	-	-	√	√	√	√	-	-	-	787,000,000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	200	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (70 unit) termasuk supervisi	-	-	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	1,050,000,000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengiriman Diklat Pegawai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100,000,000	Subbag Tata Usaha
					3. Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	200,000,000	Subbag Tata Usaha
					4. Sosialisasi Dasar-dasar Keselamatan Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Bagi SDM Perhubungan di Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-	-	171,000,000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					5. Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	110,000,000	Subbag Tata Usaha
					6. Penyusunan SAKIP, SPIP, LAPTAH, dan Profil BPTD	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	125,000,000	Subbag Tata Usaha
					7. Koordinasi Kelembagaan Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	350,000,000	Subbag Tata Usaha
					8. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	√	380,000,000	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan dan Penyeberangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105,000,000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan											Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
					10. Monitoring dan Pemantauan Fasilitas Prasarana Sungai, Danau dan Penyeberangan di Provinsi Jambi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	75.000.000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					11. Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Sungai, Danau dan Penyeberangan (Ramp Check)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					12. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					13. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Jalan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					14. Monitoring dan Evaluasi Andalalin pada Jalan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	90.000.000	Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis
					15. Monitoring dan Pembahasan Andalalin pada Jalan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	70.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
					16. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan Terminal	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
					17. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan UPPKB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	57.720.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					18. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	110.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					19. Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan Nasional	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					20. Biaya Penyidikan dan Pendampingan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
					21. Monitoring dan Pembinaan SMK serta SPM Penyelenggaraan Angkutan Umum AKAP dan AJAP di Provinsi Jambi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	65.000.000	Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan
					22. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ditjen Perhubungan Darat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					23. <i>Inhouse Consultant</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000.000	Subbag Tata Usaha
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88	1. Operasional dan pemeliharaan kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	5.902.143.000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengadaan perangkat Pengelola Data dan Informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.000.000	Subbag Tata Usaha
					3. Pengadaan Belanja Modal Lainnya	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	410.680.000	Subbag Tata Usaha
					4. Belanja gaji dan tunjangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	17.633.587.000	Subbag Tata Usaha

Jambi, Januari 2023
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi


Sigit Mintarso
NIP. 19680130 199003 1 001



REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sigit Mintarso

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah V Provinsi Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Mei 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi

SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001

REVISI I RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V PROVINSI JAMBI
TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	4.985.836.000	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9.174.025.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		4. Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	586.515.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	1. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan Terminal	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	105.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		2. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan Pemantauan Fasilitas Prasarana Transportasi SDP di Provinsi Jambi	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	75.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	1. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan 2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK) 3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 4. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	4.920.200.000 1.500.000.000 700.300.000 15.203.016.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
		2. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1. Operasional UPPKB -UPPKB Jambi Merlung -UPPKB Muara Tembesi -UPPKB Sarolangun -UPPKB Sungai Penuh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.990.735.000	
		3. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	300.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		6. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		7a. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri 2. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB 3. Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	105.000.000 110.000.000 787.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
		7b. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (70 unit) termasuk supervisi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.050.000.000	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	1. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	100.000.000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengiriman Diklat Pegawai													100.000.000	
					3. Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi													200.000.000	
					4. Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat Bidang SDP di Provinsi Jambi													91.000.000	
					5. Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran													110.000.000	
					6. Penyusunan SAKIP, SPIP, LAPTAH, dan Profil BPTD													125.000.000	
					7. Koordinasi Kelembagaan Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi													1.225.400.000	
					8. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru													380.000.000	
					9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Penyeberangan													105.000.000	
					10. Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Sungai, Danau dan Penyeberangan													70.000.000	
					11. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil Perintis Jalan													105.000.000	
					12. Monitoring dan Evaluasi Andalalin pada Jalan Nasional													90.000.000	
					13. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan UPPKB													57.720.000	
					14. Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan Nasional													100.000.000	
					15. Biaya Penyidikan dan Pendampingan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ													300.000.000	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
					16. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Bidang LLAJ (BPTD)													120.000.000	
					17. Monitoring dan Pembinaan SMK serta SPM Penyelenggaraan Angkutan Umum AKAP dan AJAP di Provinsi Jambi													65.000.000	
					18. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ditjen Perhubungan Darat													204.600.000	
					19. <i>Inhouse Consultant</i>													200.000.000	
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	2. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88	1. Operasional dan pemeliharaan kantor	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	5.902.143.000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengadaan perangkat Pengelola Data dan Informasi													173.000.000	
					3. Pengadaan Belanja Modal Lainnya													410.680.000	
					4. Belanja gaji dan tunjangan													17.633.587.000	

Jambi, Mei 2023

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



Sigit Mintarso
NIP. 19680130 199003 1 001

REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	0
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	0
		IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	10
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	0
		IKK3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80

		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	70
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK6.1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 14.985.836.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.760.540.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 48.633.241.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 583.680.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.902.143.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.633.587.000

ANGGARAN

Disetujui
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Mei 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi



SIGIT MINTARSO
NIP. 19680130 199003 1 001



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto, S.Si.T., M.T

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 16 Agustus 2023
Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

EKO INDRA YANTO, S.Si.T., M.T
NIP. 19790220 200112 1 001

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

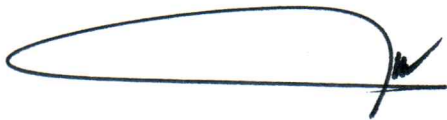
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 14.985.836.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.760.540.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 48.633.241.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 4.143.720.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 583.680.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 5.902.143.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 17.700.905.000

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 16 Agustus 2023

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO, S.Si.T., M.T
NIP. 19790220 200112 1 001

**REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
TAHUN 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Pemanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 1.	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	1. Subsidi operasional angkutan jalan	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	4.985.836.000	- Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan - Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		2. Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4	1. Operasional Terminal Penumpang Tipe A : - Terminal Alam Barajo - Terminal Sribulan Sarolangun - Terminal Bangko Merangin - Terminal Bungo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9.174.025.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		3. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	1. Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan : - Pelabuhan Penyeberangan Kuala Tungkal - Pelabuhan Sungai Ps. Angso Duo - Pelabuhan Sungai Nipah Panjang - Pelabuhan Sungai Mendahara	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	586.515.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
SK 2.	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	1. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95	1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan Terminal	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	7,9167	105.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		2. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100	1. Monitoring dan Pemantauan Fasilitas Prasarana Transportasi SDP di Provinsi Jambi	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	8,3333	75.000.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 4.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	1. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80	1. Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	4.920.200.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
					2. Perbaikan Lokasi Rawan Kecelakaan (LRK)													1.500.000.000	
					3. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan													700.300.000	
					4. Perlengkapan Jalan (Prioritas Nasional)													15.203.016.000	
		2. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	1	1. Operasional UPPKB -UPPKB Jambi Merlung -UPPKB Muara Tembesi -UPPKB Sarolangun -UPPKB Sungai Penuh	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4.990.735.000	Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		3. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500	1. Kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	300.000.000	Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
		4. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80	1. Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Perusahaan Karoseri	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	6,6667	105.000.000	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
					2. Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji UPUBKB													110.000.000	
					3. Pengadaan Alat Kalibrasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor													787.000.000	
		5. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1	1. Pengadaan dan pemasangan rambu sungai di sungai Batanghari (70 unit) termasuk supervisi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.050.000.000	Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
SK 5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	1. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87	1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi BPTD	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	100.000.000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengiriman Diklat Pegawai													100.000.000	
					3. Peningkatan Motivasi Bagi Pegawai BPTD Wilayah V Provinsi Jambi													200.000.000	
					4. Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat Bidang SDP di Provinsi Jambi													91.000.000	
					5. Penyusunan Bahan, Rencana Kerja dan Anggaran													110.000.000	
					6. Penyusunan SAKIP, SPIP, LAPTAH, dan Profil BPTD													125.000.000	
					7. Koordinasi Kelembagaan Rapat Teknis/Koordinasi/Konsolidasi													1.225.400.000	
					8. Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru													380.000.000	
					9. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil dan Perintis Penyeberangan													105.000.000	
					10. Inspeksi Keselamatan Angkutan Umum Penumpang Sungai, Danau dan Penyeberangan													70.000.000	
					11. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Komersil Perintis Jalan													105.000.000	
					12. Monitoring dan Evaluasi Andalalin pada Jalan Nasional													90.000.000	
					13. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Satuan Pelayanan UPPKB													57.720.000	
					14. Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan Nasional													100.000.000	
					15. Biaya Penyidikan dan Pendampingan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ													300.000.000	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Pelaksana / Penanggung Jawab
						B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12		
					16. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan Bidang LLAJ (BPTD)													120.000.000	
					17. Monitoring dan Pembinaan SMK serta SPM Penyelenggaraan Angkutan Umum AKAP dan AJAP di Provinsi Jambi													65.000.000	
					18. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Ditjen Perhubungan Darat													204.600.000	
					19. <i>Inhouse Consultant</i>													200.000.000	
SK 1.	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	2. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88	20. Operasional dan pemeliharaan kantor	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	7,333	5.902.143.000	Subbag Tata Usaha
					2. Pengadaan perangkat Pengelola Data dan Informasi													173.000.000	
					3. Pengadaan Belanja Modal Lainnya													410.680.000	
					4. Belanja gaji dan tunjangan													17.700.905.000	

Jambi, Agustus 2023
Kepala Balai



Eko Indra Yanto, S.Si.T., M.T
NIP. 19790220 200112 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI

JL. LINGKAR BARAT III RT. 15
KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM
BARAJO KOTA JAMBI 36124

TELP : (0741) 3081183
FAX : (0741) 3081183

EMAIL : bptd5jambi@gmail.com

Nomor : **KU.002/1/3 /BPTD KLS II -JMB /2023**
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Penandatanganan
Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Jambi, 21 November 2023

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Sehubungan dengan adanya perubahan pagu anggaran pada DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi, bersama ini terlampir kami sampaikan Revisi III Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi dan selanjutnya mohon perkenan Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat kiranya dapat menandatangani Revisi III Perjanjian Kinerja dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai

Eko Indra Yanto, S.Si.T., M.T.
NIP. 19790220 100112 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Bagian Perencanaan Setditjen Perhubungan Darat.



REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Indra Yanto, S.Si.T., M.T.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 21 November 2023

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

EKO INDRA YANTO, S.Si.T., M.T.
NIP. 19790220 200112 1 001

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

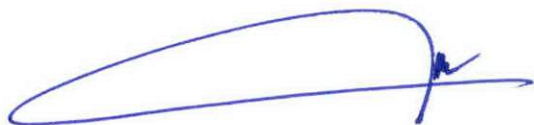
NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	4
		IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
2	SK2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di terminal tipe-A	%	95
		IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Pelabuhan SDP	%	100
3	SK4 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	80
		IKK3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	%	1
		IKK3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	1500
		IKK7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	80
		IKK7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Lokasi	1
4	SK5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	87
5	SK1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	88

KEGIATAN**ANGGARAN**

1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 14.427.244.000
2.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 9.760.540.000
3.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 47.452.655.000
4.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 5.216.495.000
5.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp. 583.680.000
6.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 6.003.168.000
7.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp. 18.358.165.000

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jambi, 21 November 2023

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas II Jambi



EKO INDRA YANTO, S.Si.T., M.T.
NIP. 19790220 200112 1 001